

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMILUKADA DALAM PANDANGAN POLITIK
WONG CILIK KOTA SEMARANG



Oleh :

Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si
NIDN: 0022046308

Dibiayai dari Sumber Dana DIPA FISIP UNDIP
Tahun Anggaran 2015

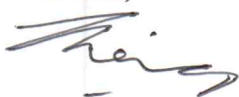
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pemilukada Dalam Pandangan Politik Wong Cilik Kota Semarang
2. Kategori Tema : Otonomi Daerah dan Desentralisasi
3. Bidang Ilmu : Ilmu Politik dan Pemerintahan
4. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si.
 - b. NIP/NIDN : 196304221989032001 / 0022046308
 - c. Jabatan Fungsional dan Golongan : Lektor dan III/c
 - d. Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Pemerintahan
 - e. Alamat dan No. Telp. Kantor : Jl Prof. Sudarto, SH, Kampus Tembalang, Semarang, Telp. 024 7465405
 - f. Alamat dan No Telp. Rumah : Jl. Tlogosari I No. 44 A, RT 01/RW 01, Bulusan, Tembalang, Kota Semarang. Telp. 08156641333
5. Lokasi Penelitian : Kota Semarang
6. Lama Penelitian : 4 (empat) bulan
7. Paket Penelitian : 3 (Tiga)
8. Biaya Yang Diperlukan : Rp. 7.370.000,00 (Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
9. Sumber Dana : DIPA FISIP UNDIP Tahun Anggaran 2015

Semarang, 30 September 2015

Ketua Peneliti,



Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si

NIP. 196304221989032001

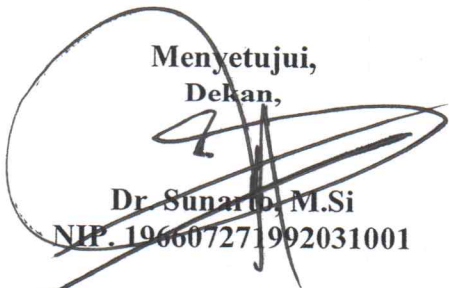
Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. Ngatno, MM

NIP. 196205061988031001

Menyetujui,
Dekan,



Dr. Sunardi, M.Si

NIP. 196607271992031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M. Si
NIP/NIDN : 19630422.198903.2.001/0022046308
Pangkat/Gol : III/C
Jabatan Fungsional : Lektor
Jurusan/Fakultas : Ilmu Pemerintahan / FISIP

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Penelitian yang kami susun dengan judul:

Pemilukada Dalam Pandangan Politik Wong Cilik Kota Semarang

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari penelitian atau karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, 30 September 2015

Pembuat Pernyataan,



Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si
NIP. 19630422.198903.2.001

Abstract

Grass root voices are often ignored by many audiences. Definition of elite voices has dictated political trends in political discourse and policies. Off course, there is great gap in regarding to grass root versus elite voices. This research is aimed at filling the gap of the study especially in regard to less powerful voices of the grass root voters in Semarang City Mayor election. Explanatory type of qualitative research. Collection of data uses survey, interview and observation. Research results show that there is great pessimism of grass root voters in city mayor election of Semarang City. They do not believe that local mayor election will make them more welfare. They view political leaders or elites only take benefits from grass root support or voices when is needed. After election is completed, the political leaders will forget or ignore their political promises to the grass roots as promised during election campaign time. Majority of grass root voters does not understand the concept of democracy, but they believe on the importance of the government existence. Grass root voters then tend to be egoistic-transactional-economic and pessimism toward the city mayor election. Immediate policies need to be made to restore these negative grass root political views. Good political communications among grass root voters, elites and the government need to be established.

Keywords: *grass root voters, political distrust, political pessimism.*

Abstrak

Suara *Wong Cilik* sering diabaikan. Dominasi suara elit telah menentukan tren politik dalam wacana dan kebijakan politik. Ada kesenjangan besar antara *Wong Cilik* dengan suara elit. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan terutama studi dalam hal kurang kuatnya suara dari pemilih *Wong Cilik* dalam pemilu Walikota Kota Semarang. Tipe explanatory dan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan survey, wawancara dan observasi. *Wong Cilik* diidentifikasi berdasarkan indikator ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pesimisme besar pemilih *Wong Cilik* dalam pemilihan walikota Semarang. Mereka tidak percaya bahwa pemilu walikota setempat akan membuat mereka lebih sejahtera. Mereka melihat para pemimpin politik atau elit hanya mengambil manfaat dari dukungan *Wong Cilik* atau suara ketika dibutuhkan. Setelah pemilu selesai, para pemimpin politik akan melupakan atau mengabaikan janji-janji politik. Mayoritas pemilih *Wong Cilik* tidak percaya untuk elit mereka. Akibatnya, sejumlah partisipasi politik *Wong Cilik* rendah. Pemilih *Wong Cilik* kemudian cenderung memiliki persepsi negatif terhadap pemilihan walikota. Kebijakan perlu dibuat segera untuk mengembalikan pandangan politik *Wong Cilik* yang negatif ini. Komunikasi politik yang baik antara pemilih *Wong Cilik*, elit dan pemerintah perlu dibentuk.

Kata kunci: *Wong Cilik*, ketidakpercayaan politik, pesimisme politik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTACT	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTARLAMPIRAN	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Signifikansi Studi	4
1.5. Kontribusi Penelitian	5
1.6. Luaran Penelitian	5
1.7. Tinjauan Pustaka	6
1.8. Metode Penelitian	13
 BAB II. PROFIL SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK KOTA SEMARANG	 16
2.1 Profil Geografis dan Demografis Kota Semarang ..	16
2.2 Profil Sosial Kota Semarang	22
2.3 Profil Ekonomi Kota Semarang	26
2.4 Profil Politik Kota Semarang	40
 BAB III. PANDANGAN WONG CILIK TERHADAP PEMILUKADA DI KOTA SEMARANG	 44
3.1 Penyajian Data Penelitian	44
3.2 Analisa Data	61
 BAB IV. PENUTUP	 67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran-Saran	68
 DAFTAR PUSTAKA	 70
 LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Kerangka Konseptual Perilaku Politik <i>Graass Root</i>	13

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Deskripsi Kota Semarang Berdasarkan Jumlah Kelurahan dan Luas Per Wilayah Kecamatan, Tahun 2013	17
Tabel 2.2	Ketinggian Wilayah Kecamatan dari Permukaan Air Laut di Kota Semarang	19
Tabel 2.3	Data Kependudukan Kota Semarang, Tahun 2011 – 2013	20
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Sebarannya Per Kecamatan, Tahun 2013	21
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Semarang, Tahun 2013	22
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Kota Semarang Sesuai Jenis kelamin Tahun 2011 – 2013	23
Tabel 2.7	Status Capaian Tujuan ke-2 MDGs Kota Semarang	25
Tabel 2.8	Data Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kota Semarang Tahun 2013	26
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Kota Semarang Sesuai Jenis Umur dan Rasio Ketergantungannya, Tahun 2012 – 2013	27
Tabel 2.10	Nilai TPAK – TPT Kota Semarang Tahun 2011 – 2013	28
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Kota Semarang, Tahun 2013	30
Tabel 2.12	Banyaknya Pekerja Dirinci Menurut Pendidikan Di Kota Semarang, Tahun 2013	31
Tabel 2.13	PDRB Atas dasar Harga Konstan Tahun 2012 – 2013	33
Tabel 2.14	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 – 2013	34
Tabel 2.15	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 – 2013.....	35
Tabel 2.16	Indeks Pembangunan Manusia Series Tahun 2007 s.d. 2013 Kota Semarang	36
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2011 – 2013	37
Tabel 2.18	Rekapitulasi Warga Miskin Kota semarang, 2015	38
Tabel 2.19	Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu DPRD Kota Semarang	39

Tabel 2.20	Partai Pemenang Pemilu Legislatif dan Nama, Partai Pengusung serta Perolehan Suara Pasangan Calon Peemilukada Kota Semarang 2005 dan 2010	41
Tabel 2.21	Jumlah Pemilih, Partisipasi dan Suara Sah Pilkada Kota Semarang Tahun 2005 dan Tahun 2010	43
Tabel 3.2	Sebaran Responden-Informan Berdasarkan Agama.....	45
Tabel 3.3	Identifikasi Responden-Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
Tabel 3.4	Identifikasi Responden-Informan Berdasarkan Mata Pencaharian	47
Tabel 3.5	Identifikasi Responden-Informan Berdasarkan Besarnya Penghasilan	48
Tabel 3.6	Pemahaman Responden Terhadap Makna Demokrasi	49
Tabel 3.7	Pandangan Wong Cilik Tentang Masalah Mendesak Kota Semarang	51
Tabel 3.8	Media Publik Paling Sering Digunakan Wong Cilik Kota Semarang	52
Tabel 3.9	Pihak Yang Paling Sering Diajak Wong Cilik Berdiskusi Dalam Menetapkan Pemimpin	53
Tabel 3.10	Sifat Kepemimpinan Yang Paling Penting Dimiliki Oleh Calon Walikota Semarang	54
Tabel 3.11	Pandangan Wong Cilik Tentang Kewajaran Pemberian Uang / Hadiah Dalam Pemilukada Oleh Calon Walikota Semarang	55
Tabel 3.12	Respon Wong Cilik Terhadap Pemberian Uang / Hadiah Dalam Pemilukada Oleh Calon Walikota Semarang	56
Tabel 3.13	Nilai Rupiah dari Pemberian Calon Walikota Yang Diharapkan Wong Cilik Dalam Pemilukada Kota Semarang	57
Tabel 3.14	Dasar Pertimbangan Utama Memilih Calon Walikota Semarang..	58
Tabel 3.15	Profesi Calon Walikota Semarang Yang Dikehendaki Wong Cilik	59
Tabel 3.16	Preferensi Responden-Informan Terhadap Pemilukada Langsung dan Pemilukada Tidak Langsung /Melalui DPRD	61

DAFTAR LAMPIRAN

SK Rektor Universitas Diponegoro, Nomor: 254 / SK / UM7.3.7 / 2015 Tentang Pemberian Bantuan Penyusunan Penelitian Pembinaan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas diponegoro Tahun 2015

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara teoritik, latar belakang penelitian ini mendasarkan diri pada pemikiran bahwa selama ini wacana pandangan politik sebagian besar didominasi oleh pandangan-pandangan politik kaum elit, yakni kaum yang memegang kekuasaan, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Kelompok *Wong Cilik* atau *grass root* kurang mendapatkan tempat dan tidak menjadi sumber wacana yang cukup dalam diskursus persoalan-persoalan sosial politik termasuk tentang pemilihan kepala daerah.

Perdebatan Pilkada tentunya menjadi ruang, kesempatan dan kedudukan yang sama di semua elemen masyarakat, karena sebagai negara penganut paham demokrasi, kedaulatan menjadi milik rakyat. Oleh sebab itu, bukan hanya yang berasal dari elit politik, status sosial dan ekonomi tertentu saja, namun semua rakyat, termasuk juga masyarakat awam yang bergabung dalam Kelompok *Wong Cilik* dapat ikut menyampaikan pandangan, persepsi dan penilaian politiknya. Selama ini pandangan, persepsi dan penilaian politik kaum elite tentang pemilu sudah sering diekspos, baik melalui media cetak, media elektronik maupun karya ilmiah dan lain sebagainya. Sedangkan pandangan, persepsi dan penilaian politik dari Kelompok *Wong Cilik*, jika dibandingkan dengan elite, masih sangat terbatas, diantara penyebabnya adalah bahwa mereka tidak memiliki akses atau dipandang sebelah mata untuk menyampaikan pandangan, persepsi dan penilaian politiknya.

Sementara itu, makna penting yang terkandung dalam demokrasi sesungguhnya adalah kedaulatan berada ditangan rakyat. Adapun salah satu perwujudan atau mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut adalah dengan melaksanakan pemilihan umum (Pemilu). Di Indonesia, terdapat beberapa macam Pemilu (yang

diselenggarakan setiap 5 tahun sekali) untuk memilih para aktor atau elite yang akan memimpin negeri ini, yaitu Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPD, DPR dan DPRD, serta Pemilu Eksekutif untuk memilih presiden (Pilpres), kepala daerah (Pemilukada: Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan pada tingkat paling bawah dari level pemerintahan di Indonesia adalah Pemilu Kepala Desa (Pilkades). Sedangkan mekanisme Pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia ada dua macam, yaitu Pemilu sistem perwakilan dan Pemilu langsung.

Sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia mencatat bahwa sejak Indonesia merdeka hingga selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, mekanisme Pemilu Presiden-Wakil Presiden dan Kepala Daerah (baik tingkat I untuk pemilihan gubernur dan wakilnya maupun Tingkat II untuk bupati atau walikota dan wakilnya) yang diterapkan adalah melalui sistem perwakilan. Dalam Pemilu sistem perwakilan ini, presiden dipilih oleh MPR, gubernur dipilih oleh DPRD Propinsi, sedangkan bupati/walikota dipilih oleh DPRD kabupaten/kota. Dalam perkembangannya, Pemilu sistem perwakilan ini dinilai tidak demokratis, rakyat pemilik kedaulatan merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpinnya. Reformasi Tahun 1998 yang berhasil menggulingkan pemerintahan otoriter selama 32 tahun dan menggantikannya dengan pemerintahan yang lebih demokratis, dimana nilai-nilai demokrasi dibuka lebih luas lagi melalui demokrasi langsung oleh rakyat pada pengisian jabatan politik. Faktor inilah yang kemudian mendorong diselenggarakannya semua jenis pemilu dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, termasuk Pemilukada. Namun gagasan pemilihan langsung kepala daerah yang secara formal baru terealisasi pada 2004 dan baru dilaksanakan pada 2005¹, hasil evaluasi sepanjang kurang lebih 10 tahun (2004 – 2014) pelaksanaan Pemilukada Langsung, menunjukkan bahwa Pemilukada Langsung memiliki tidak hanya dampak yang bersifat positif tetapi juga negatif yang menyebabkan munculnya pro – kontra terhadap keberlanjutan pelaksanaannya, yaitu apakah pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara

¹ Retno Saraswati dalam R. Nazriyah “Dinamika Pemilihan Gubernur Jawa Timur”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 20 OKTOBER 2013: 645 diunduh Selasa, 20 Januari 2015 jam 09.15)

1.7 TINJAUAN PUSTAKA

1.7.1 Politik masyarakat *grass root*

Makna politik *grass root* dalam penelitian ini mengacu pada politik rakyat biasa. Dalam ilmu politik, masyarakat *grass root* adalah pemilih itu sendiri. Masyarakat *grass root* didefinisikan sebagai "as *“the ordinary people as distinct from the active leadership of a party or organization: used esp of the rank-and-file members of political party, or the voter themselves”* (Collins English Dictionary: 2003). Sumber kamus lain menjelaskan masyarakat *grass root* sebagai "*“ordinary citizens, esp. As contrasted with the ; leadership or elite. The people inhabiting these areas, esp. As a political, social, or economic group”* (Random House Dictionary: 2005).

Para ahli mengatakan bahwa:

“In relations to *grass root* political views or behavior, it can be explained that political view is not different from political opinion, perception or political values. Political view is a way of people valuing, perceiving or viewing to any kinds of politics. It is a view to any political objects such as democracy, elections, political parties and many others (Bartels 1996:34-35; McAllister, I & Juliet Clark, J. 2007: 1).

Danziger (2005: 25) menegaskan pandangan politik atau pendapat atau keyakinan politik individu sebagai "*“factual knowledge about the political world”*. Keyakinan politik tidak hanya berurusan dengan pengetahuan politik tetapi juga mengacu pada kognitif, afektif dan orientasi evaluatif. Tampilan atau pendapat politik adalah kapasitas orang untuk menanggapi masalah politik atau masalah (Converse, 1987: 3-4). Pendapat atau pandangan politik rakyat dapat ditentukan oleh beberapa hal yaitu pengetahuan / kognisi, perasaan atau preferensi (kasih sayang) dan akhirnya evaluasi yang memiliki kecenderungan untuk menjadi perilaku (psikomotoric) (Danziger 2005: 25-27). Pengetahuan seseorang dalam melihat masalah politik atau masalah ditentukan oleh pendidikannya, apakah jenis pendidikan formal maupun informal. Perasaan atau preferensi seseorang dipengaruhi oleh kondisi psikologis seperti pengalaman politik yang baik atau buruk, trauma politik atau pengalaman lain yang berhubungan dengan kasih

sayang. Tindakan atau perilaku politik merupakan respon berikutnya atas pengetahuan dan preferensi seseorang. Meskipun ada pendapat bahwa pengetahuan dan preferensi positif tidak selalu berakhir dalam perilaku positif, dan sebaliknya (McAllister, I & Juliet Clark, J. 2007: 1-2).

Pandangan atau pendapat politik didefinisikan sebagai "*Collective evaluations expressed by people on political issues, policies, institutions and individuals*". "Atau dapat dikatakan sebagai " *a collective distribution of individual preferences or evaluation on a given issue, policy or persons* " (McAllister, I & Juliet Clark, J. 2007: 1-2). Oleh karena itu, pandangan atau pendapat politik adalah kapasitas orang untuk menanggapi isu-isu politik, kebijakan, pemimpin pemerintah dan kepemimpinan atau lainnya. Pandangan politik biasanya terkait dengan respon afeksi (tahu, suka atau tidak suka) terhadap banyak masalah politik atau masalah. Sementara itu, politik tingkat jalan dalam literatur ilmu politik adalah bagian dari politik *grass root*. *Grass root* politik bukanlah studi yang sangat baru dalam politik sebenarnya. Namun, demokratisasi saat ini menekankan obyek studi ini menjadi salah satu analisis yang penting dalam ilmu politik.

Selanjutnya, politik *grass root* juga penting karena demokrasi menempatkan orang-orang di garis dasar sebuah negara demokrasi.

Dominasi politik elit juga telah menempatkan pentingnya orang-orang biasa dalam reaksi terhadap kualitas demokrasi dari suatu negara. Hal ini umumnya ditemukan bahwa pendapat atau perilaku *grass root* sering dimanipulasi oleh elit politik. Manipulasi ini hanya dimaksudkan untuk melayani para elit politik sendiri.

Pendapat atau pandangan politik seseorang yang secara sosiologis dipengaruhi oleh beberapa agen penting, yaitu keluarga, sekolah, kelompok sebaya, organisasi politik, aktor negara atau organisasi dan media massa (Schwarzer 2011: 1-2). Keluarga adalah agen utama dan pertama yang menentukan atau mempengaruhi pandangan atau pendapat politik seseorang. Di tingkat keluarga, orang untuk pertama kalinya memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu termasuk masalah politik. Jika, misalnya, keluarga memiliki tradisi politik liberal yang kuat, ia

kemudian memiliki kecenderungan kuat untuk menjadi orang liberal (Owen 2008: 1-2).

Sekolah adalah agen penting kedua dari sosialisasi politik. Sekolah juga mempengaruhi pengetahuan dan pendapat orang mengenai banyak masalah politik. Interaksi antara siswa dan guru melalui komunikasi formal dalam kelas memberikan pengetahuan politik awal untuk mahasiswa. Siswa juga dapat belajar banyak hal dari sumber daya sekolah seperti perpustakaan, bermain peran, dan banyak cara lain. Banyak pelajaran berpikir di sekolah seperti sejarah politik, ideologi sederhana dan urusan sosial politik lainnya menyebabkan siswa memahami politik.

Agen berikutnya relevan yang penting dalam menentukan pandangan atau pendapat politik seseorang adalah *peer group*. Pandangan politik rekan kelompok mempengaruhi seseorang dengan beberapa cara, misalnya, melalui diskusi kelompok atau identifikasi kelompok. Komunikasi intensif dan diskusi tentang politik antara orang-orang dalam kelompok membuat seseorang mungkin untuk memahami hal-hal politik yang lebih baik. Latar belakang ekonomi-sosial politik yang berbeda dari anggota kelompok (orang) dapat menghasilkan banyak masukan untuk pandangan atau pendapat politik seseorang.

Organisasi juga agen lainnya memberikan kontribusi untuk pandangan atau pendapat politik seseorang. Organisasi baik secara formal dan informal menentukan pendapat politik seseorang. Dalam konteks politik Indonesia, misalnya, orang yang aktif dalam Nahdatul Ulama cenderung aktivis atau pendukung partai politik PKB. Sedangkan, orang yang aktif di Organisasi Muhammadiyah, misalnya, cenderung aktif di partai PAN baik sebagai aktivis atau pendukung politik.

Negara juga aktor lain yang relevan yang mempengaruhi pandangan atau pendapat politik seseorang. Negara atau pemerintah, kebijakan dan tindakannya mempengaruhi bagaimana orang atau warga masyarakat mengartikan masalah-masalah politik. Apakah negara atau pemerintah adalah demokratis atau otoriter dapat mempengaruhi persepsi orang terhadap hal-hal politik. Ada kecenderungan bahwa negara yang lebih demokratis, opini politik yang lebih baik dari suatu masyarakat negara.

Akhirnya, terakhir tetapi bukan yang paling akhir, media massa yang berpengaruh sangat kuat dalam menentukan pandangan atau pendapat seseorang. Media massa memainkan pandangan atau pendapat politik yang sangat penting. Sumber media massa seperti televisi, radio, koran dan media sosial saat ini (internet, facebook, twitter, instagram dan sejenisnya) memberikan akses informasi penting kepada orang-orang sehingga mereka dapat menemukan banyak berita politik dan analisis. Berita media massa dan analisis memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan pandangan atau pendapat politik.

1.7.2 Demokrasi dan Pemilu

Demokrasi diadopsi oleh mayoritas negara-negara di dunia global saat ini. Penelitian UNESCO (1949) yang dikutip oleh Miriam Budiardjo (2012: 105), menyebutkan bahwa *"probably for the first time in history, democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents."* Samuel Huntington juga menegaskan bahwa hampir semua negara di dunia menuju menjadi negara yang demokratis melalui gelombang demokratisasi. Huntington menjelaskan bahwa *"at least 30 countries made transitions to democracy, just about doubling the number of democratic governments in the world"* (Huntington, 1991 & 1997). Pasca Dunia komunis di Eropa Timur menguatkan penjelasan Huntington tentang demokrasi dalam praktek.

Meskipun masih ada perdebatan tentang definisi demokrasi, ringkasan Sodaro tentang konsep demokrasi adalah relevan. Sodaro (2004, 31) menjelaskan demokrasi sebagai:

“The essential idea of democracy is that the people have the right to determine who governs them. In most cases they elect the principal governing officials and hold them accountable for their actions. Democracies also impose legal limits on the government’s authority by guaranteeing certain rights and freedoms to their citizens.”

MacGregor Burns (1989: 3) menambahkan konsep demokrasi dengan menyatakan bahwa demokrasi adalah:

“A system of government in which those who have authority to make decisions (that have the force of law) acquire and retain this authority either directly or indirectly as the result of winning free elections in which the great majority of adult citizens are allowed to participate.”

Demokrasi dapat dibentuk dalam demokrasi langsung atau tidak langsung. Bryan A. Garner (1999: 444) menjelaskan bahwa demokrasi adalah “....government by the people, either directly or through representatives”. Raaflaub, Ober & Wallace (2007: 5) kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa:

“Direct democracy (or pure democracy) is a form of government in which people vote on policy initiatives directly, as opposed to a representative democracy in which people vote for representatives who then vote on policy initiatives.”

Sedangkan, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan didefinisikan sebagai " *a variety of democracy founded on the principle of elected officials representing a group of people, as opposed to direct democracy*. ("Victorian Electronic Democracy : Glossary, diakses 28 Juli 2005). John Stuart Mill (1988: 233) lebih lanjut menjelaskan bahwa:

“...but since all cannot, in a community exceeding a single small town, participate personally in any but some very minor portions of the public business it follows that the ideal type of a perfect government must be representative ”.

Salah satu indikator penting dari demokrasi adalah pemilu. Pemilihan akan menentukan siapa yang harus ada didalam atau diluar pemerintah. Kontrak sosial

seperti yang ditulis oleh John Locke (Second Treatise of Government Sipil, 1690) yaitu "*If a government breaks the social contract, the people have the right to dissolve it.*" Teori Kontrak Sosial ini seperti yang dipopulerkan oleh Jean Jacques Rousseau sangat menegaskan bahwa posisi orang dan kekuasaan dalam pemilu sangat penting. Orang-orang memiliki kekuatan yang kuat dan rekomendasi untuk masa depan dari negara (Sudarsono, 1991: 110).

Pemilu harus ditangani dengan sempurna, baik dari segi demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Pemilihan yang bebas dan adil tidak berarti hanya sebatas terkait dengan tersedianya kotak surat dalam kondisi yang memadai, tetapi pemilih juga harus memiliki akses ke informasi yang cukup tentang partai politik, calon dan proses pemilihan untuk dapat membuat pilihan yang informatif dan bertanggung jawab.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), pasal 21, memberikan jaminan yang baik bahwa:

1. *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
2. *Everyone has the right to equal access to public service in his country.*
3. *The will of the people shall be the basis of the authority of government; This will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be held by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*

Pemilu adalah elemen penting dari demokrasi dan harus menjadi jaminan bahwa pemilu yang bebas dan adil dilakukan. Oleh karena itu penting untuk dicatat bahwa pemilihan umum yang bebas dan adil adalah kunci demokrasi apapun. Mereka sangat penting untuk transfer kekuasaan secara damai. Ketika para pemilih memilih wakil, mereka memilih pemimpin yang akan membentuk masa depan masyarakat mereka. Inilah sebabnya mengapa pemilu memberdayakan warga biasa, karena pemilu memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan masa depan pemerintah mereka, dan dengan demikian, masa depan mereka sendiri.

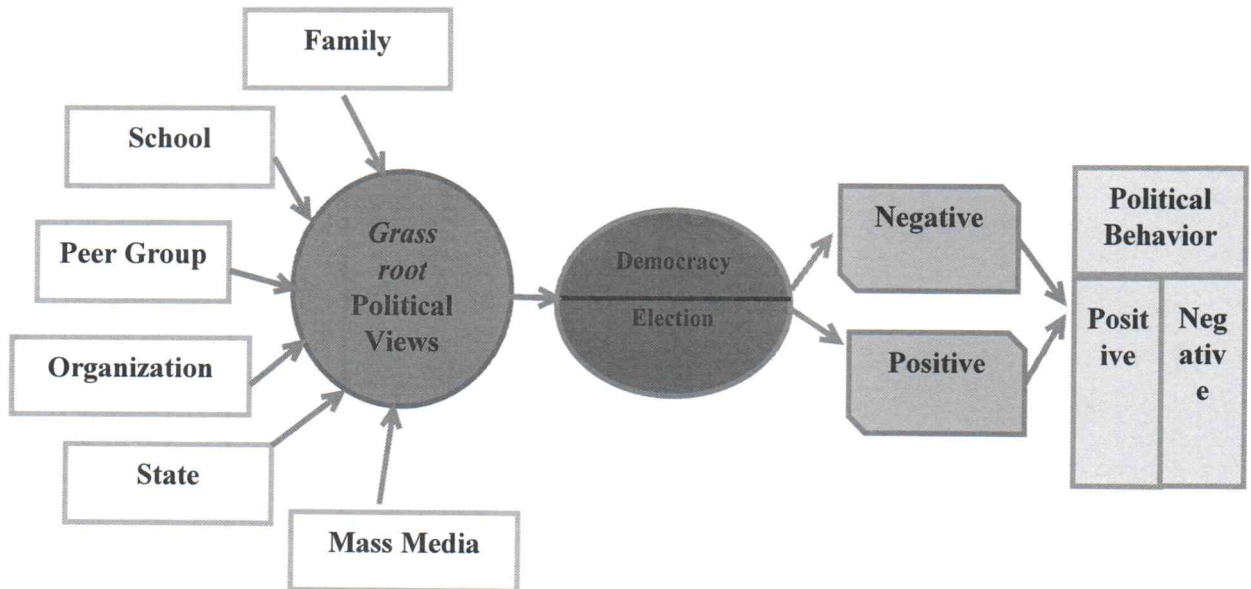
1.7.3 Pandangan dan perilaku politik *grass root* terhadap pemilu

Rakyat adalah raja dalam sistem demokrasi negara. Rakyat tidak hanya ditujukan kepada kelompok elit, tetapi juga orang-orang biasa atau masyarakat *grass root*. Masyarakat *grass root* adalah salah satu elemen penting dalam politik suatu negara, baik di tingkat nasional atau lokal. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, pandangan politik atau opini *grass root* adalah cara bagaimana orang-orang biasa mengetahui, memahami dan mengerti tentang urusan politik (diantaranya terkait demokrasi dan pemilu). Pendapat dan pandangan politik *grass root* tersebut dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, kelompok sebaya, organisasi, negara dan media massa.

Dalam bereaksi terhadap pemilu atau demokrasi, masyarakat *grass root* mungkin melihatnya sebagai positif atau negatif. Dalam hal pandangan positif atau optimis, masyarakat *grass root* dapat melihat demokrasi atau pemilihan umum memiliki harapan untuk masa depan mereka. Dengan melakukan pemilihan yang baik (sebagai salah satu elemen penting demokrasi), orang mungkin berharap untuk kualitas hidup mereka dalam pendidikan, kesehatan atau kesejahteraan ekonomi menjadi lebih baik.

Sedangkan, pandangan negatif atau pesimis mungkin melihat pemilu sebagai bukan cara untuk memperbaiki atau membangun kehidupan masa depan mereka. Pandangan ini tidak melihat pemilu sebagai bagian penting dari demokrasi untuk mengubah hidup mereka lebih baik. Mereka cenderung melihat pemilu sebagai praktek demokrasi yang tidak memiliki korelasi dengan kehidupan mereka. Mereka mungkin pesimis atau pragmatis karena tidak ada jaminan bahwa ada hubungan yang kuat antara pemilu dan kesejahteraan mereka. Mereka bereaksi negatif terhadap keberadaan pemimpin politik atau perwakilan. Alasan mereka untuk ini adalah hanya karena pengalaman mereka bahwa para pemimpin politik sejauh ini tidak dapat memverifikasi janji politik mereka selama kampanye pemilu.

Berdasarkan aspek teoritis ini, penelitian ini kemudian menyediakan penelitian konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Perilaku Politik *Grass root*

1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu menggabungkan survei dan jenis kualitatif. Sugiyono (2009: 4) dan Denzin dan Lincoln (2003: 6-9) menyatakan bahwa menggabungkan dua jenis penelitian dapat memberikan wawasan dan pemahaman mendalam tentang fokus penelitian. Penelitian kuantitatif menyediakan data wawasan dalam hal jumlah dan mungkin dapat menggeneralisasi gambaran umum. Sedangkan, jenis kualitatif digunakan untuk memperdalam penelitian difokuskan dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi.

1.8.2 Metode Pengumpulan Data

a. Survey

Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 sebuah responden untuk semua kategori masyarakat *grass root*. Untuk menghindari hal yang membingungkan, masyarakat *grass root* dalam penelitian ini diukur dengan indikator ekonomi yaitu orang-orang yang hidup di tingkat pendapatan rendah (dibawah atau sama dengan Upah Minimal Regional Kota Semarang Tahun 2015, yaitu Rp. 1.685.000). Karena masyarakat *grass root* yang homogen, mengambil 100 sampel dapat dibenarkan. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling berdasarkan pembagian lima wilayah utama, yaitu utara, barat, selatan, timur dan bagian tengah Kota Semarang. Setiap bagian diambil 20 responden.

b. Wawancara

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk memperdalam pandangan, persepsi atau pendapat politik *grass root*. Informan kunci dipilih dari tokoh atau pemimpin masyarakat *grass root*. Informan ini dari asosiasi baik formal maupun informal yang mereka miliki, seperti asosiasi pedagang kaki lima atau pedagang pasar tradisional, tukang ojek, becak, dan sopir taxi. Metode seleksi informan didasarkan pada purposive. Dasar pertimbangan dalam memilih informan secara purposive didasarkan pada perhatian bahwa seorang informan tahu dengan baik tentang perihal kisah, konteks, hasil dan proses kehidupan masyarakat *grass root* di kota Semarang. Dua metode data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini, yaitu wawancara dan observasi.

1.8.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data didasarkan pada statistik deskriptif untuk survei dan teknik interpretatif untuk jenis kualitatif. Teknik statistik-deskriptif ditempatkan untuk menemukan kecenderungan umum yang mungkin mencerminkan suara masyarakat. Meskipun, penelitian ini sebenarnya tidak mencoba untuk membuat generalisasi dari temuan penelitian. Teknik interpretatif digunakan untuk menganalisis secara mendalam dilakukan wawancara dengan informan kunci.

BAB II

PROFIL SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Terkait dengan judul penelitian “Pemilukada Dalam Pandangan Politik *Wong Cilik* Kota Semarang, 2015” maka dalam Bab II ini akan disampaikan gambaran Kota Semarang dari sudut letak geografis, demografis serta kehidupan di bidang sosial, ekonomi dan politik.

2.1. Profil Geografis dan Demografis Kota Semarang

Profil geografis Kota Semarang akan dideskripsikan melalui penjelasan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kota Semarang.

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas Kota Semarang merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dan tepatnya adalah seluas 373,70 Km². Sedangkan wilayahnya berbatasan sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Adapun secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dengan 177 Kelurahan dengan sebaran luas untuk masing-masing kecamatan adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Deskripsi Kota Semarang Berdasarkan
Jumlah Kelurahan dan Luas Per Wilayah Kecamatan, Tahun 2013

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km2)
1.	Mijen	14	57,55
2.	Gunungpati	16	54,11
3.	Banyumanik	11	25,69
4.	Gajahmungkur	8	9,07
5.	Semarang Selatan	10	5,93
6.	Candisari	7	6,54
7.	Tembalang	12	44,20
8.	Pedurungan	12	20,72
9.	Genuk	13	27,39
10.	Gayamsari	7	6,18
11.	Semarang Timur	10	7,70
12.	Semarang Utara	9	10,97
13.	Semarang Tengah	15	6,14
14.	Semarang Barat	16	21,74
15.	Tugu	7	31,78
16.	Ngalian	10	37,99
	Total	177	373,70

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2015, <http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wp-content/uploads/2014/07/rkpd-2015-full-fix.pdf>

Pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat 3 dari 16 kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yaitu secara berurutan dari yang terluas adalah Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati dan Tembalang. Namun luasnya kepemilikan wilayah ini tidak berarti selalu signifikan dengan jumlah kelurahan yang dimilikinya, karena sedikit banyaknya jumlah kelurahan

akan ditentukan tidak hanya luas wilayah tetapi juga oleh jumlah dan kepadatan penduduknya.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan sebuah kota besar yang sangat strategis karena letaknya yang secara geografis berada di tengah-tengah Pulau Jawa atau tengah-tengah pantai utara Jawa, terletak antara garis $6^{\circ}50'$ dan $7^{\circ}40'$ Lintang Selatan dan antara $109^{\circ}35'$ dan $110^{\circ}50'$ Bujur Timur.

Posisi geostrategis yang secara ekonomis sangat menguntungkan dimiliki oleh Kota Semarang, yaitu dengan posisi letaknya yang berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. (<http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wp-content/uploads/2014/07/rkpd-2015-full-fix.pdf>).

c. Topografi

Kota Semarang secara topografis terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan topografi yang seperti ini maka Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% - 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75–348,00 mdpl. Kondisi ini juga menyebabkan ketinggian antar wilayah

dari permukaan air laut menjadi beragam, sebagaimana dideskripsikan oleh tabel berikut ini.

Tabel 2.2

**Ketinggian Wilayah Kecamatan dari Permukaan AirLaut
Di Kota Semarang**

No.	Bagian Wilayah	Ketinggian (m) diatas permukaan air laut
1.	Daerah Pantai	0.75
2.	Daerah Dataran Reendah:	
	1. Pusat Keramaian Kota	2.45
	2. Simpang Lima	3.49
3.	Daerah Perbukitan:	
	1. Candi Baru	90.56
	2. Jatingaleh	136.00
	3. Gombel	270.00
	4. Gunungpati (Sebelah Barat)	259.00
	5. Gunungpati (Sebelah Timur Laut)	348.00
	6. Mijen (Bagian Atas)	253.00

Sumber: <http://semarangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/2>

Posisi topografis Kota Semarang ini memberi keuntungan tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain, khususnya dibidang wisata, yaitu wilayah Kota nya kemudian terbelah menjadi 2 wilayah yang dikenal dengan sebutan Kota Atas dan Kota Bawah. Berdasarkan gambaran ketinggian dari atas permukaan air laut di beberapa wilayah tersebut pada tabel di atas, Kota Bawah meliputi daerah pantai, Pusat Keramaian Kota, Simpang Lima dan Candi Baru. Sedangkan Kota Atas meliputi Jatingaleh, Gombel, Gunungpati dan Mijen.

Pemandangan Kota Bawah akan dapat dilihat dari Kota Atas. Hal ini menjadi aset wisata Kota Semarang yang unik, berharga dan sangat menarik, yang tidak banyak dimiliki oleh kota-kota lainnya.

d. Demografi

Kota Semarang adalah salah satu Kota yang paling berkembang di Provinsi Jawa Tengah. Ini tentu bisa dipahami karena Kota ini merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 377 Km² dengan jumlah penduduknya yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pertumbuhan penduduknya pada 3 tahun terakhir dari tahun 2013 bergerak secara fluktuatif. Pergerakan angka yang fluktuatif ini juga terjadi pada kepadatan penduduk, jumlah Ru Ta (rumah tangga) dan rata-rata ART (anggota rumah tangga). Adapun pertumbuhan penduduknya cukup bagus karena ada penurunan dari tahun ke tahun. Dalam bentuk tabel data kependudukan Kota Semarang ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Kependudukan Kota Semarang, Tahun 2011 - 2013

Indikator	Tahun		
	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk (000 jiwa)	1.544	1.559	1.572
Pertumbuhan penduduk (%)	1,11	0,96	0,83
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	4.604	4.172	4.207
Sex Ratio (L/P) (%)	98,89	98,89	99
Jumlah Ru Ta (000 ruta)	429,3	416,57	442,1
Rata-rata ART (jiwa/ruta)	3,6	3,8	3,56
% Penduduk menurut kelompok umur:			
0-14 thn	23,59	24,68	23,77
15-64 thn	71,63	70,99	71,28
> 65 thn	4,78	4,33	4,95

Sumber: Profil Kependudukan, 2013, http://semarangkota.bps.go.id/webbeta/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kota-Semarang-2014---.pdf

Terkait rasio jenis kelamin, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan 1 persen lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Khusus pada Tahun 2013, terkait deskripsi data kependudukan Kota Semarang disampaikan secara lebih detail melalui data sebaran penduduk per kecamatan, data kependudukan menurut jenis kelamin, data kependudukan menurut pendidikan, data kependudukan menurut kelompok usia dalam bentuk tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Sebarannya Per Kecamatan, Tahun 2013

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk
		Orang	%	
1.	Mijen	57.887	4	1.006
2.	Gunungpati	75.885	5	1.402
3.	Banyumanik	130.494	8	5.080
4.	Gajahmungkur	63.599	4	7.012
5.	Semarang Selatan	82.293	5	13.882
6.	Candisari	79.706	5	12.187
7.	Tembalang	147.564	9	3.339
8.	Pedurungan	177.143	11	8.549
9.	Genuk	93.439	6	3.411
10.	Gayamsari	73.745	5	11.939
11.	Semarang Timur	78.622	5	10.211
12.	Semarang Utara	128.026	8	11.671
13.	Semarang Tengah	71.200	5	11.596
14.	Semarang Barat	158.668	10	7.298
15.	Tugu	31.279	2	984
16.	Ngalian	122.555	8	3.226
	Total	1.572.105	100	4.207

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2014, BPS Kota Semarang, diolah.

Pada tabel diatas dapat dibaca bahwa 3 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling besar, secara berurutan dari yang tertinggi adalah

Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tembalang. Adapun wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Semarang Selatan. Hal ini bisa dipahami karena wilayah tersebut menjadi pusat Kota Semarang.

2.2 Profil Sosial Kota Semarang

a. Agama dan Suku Bangsa

Mayoritas penduduk Kota Semarang adalah Suku Jawa dan memeluk agama Islam. Namun demikian, sebagaimana yang ada di daerah lain, Kota Semarang juga memiliki komunitas Tionghoa, tetapi komunitas orang-orang Tionghoa di Kota Semarang cukup besar (dengan jumlah peringkat kedua setelah suku Jawa) dan kebesarannya ditandai dengan diabadikannya sebuah petilasan, yaitu bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang Laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Zheng He / Cheng Ho. Tempat petilasan tersebut di kenal dengan sebutan Sam Po Kong. Selain etnis keturunan China, hidup dan tinggal pula warga negara Indonesia keturunan Arab dan India. Dari berbagai etnis ini dapat hidup bersama secara relatif rukun dan damai. Mereka sudah berbaur erat dengan penduduk setempat dan menggunakan Bahasa Jawa dalam berkomunikasi sejak ratusan tahun silam. Deskripsi secara lebih detail perihal data kependudukan berdasarkan pemeluk agama di Kota Semarang adalah sebagaimana tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Semarang, Tahun 2013

Kecamatan	2013					
	Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa)					
	Islam	Protestan	Budha	Hindu	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Mijen	54489.00	1851.00	15.00	50.00	0.00	57887.00
Gunungpati	72942.00	1353.00	202.00	109.00	0.00	75885.00
Banyumanik	106696.00	10677.00	665.00	316.00	0.00	130494.00

1	2	3	4	5	6	7
Gajahmungkur	55169.00	3700.00	173.00	157.00	0.00	63599.00
Smg Selatan	66123.00	6668.00	644.00	1133.00	358.00	82293.00
Candisari	65105.00	6651.00	503.00	589.00	91.00	79706.00
Tembalang	127554.00	9737.00	384.00	267.00	99.00	147564.00
Pedurungan	146448.00	13770.00	1590.00	897.00	1225.00	177143.00
Genuk	88330.00	2398.00	119.00	113.00	0.00	93439.00
Gayamsari	65956.00	3109.00	747.00	396.00	52.00	73745.00
Smg Timur	53793.00	9904.00	2290.00	1267.00	126.00	78622.00
Smg Timur	102550.00	10132.00	2379.00	397.00	36.00	128026.00
Smg Tengah	43300.00	9651.00	6298.00	1449.00	198.00	71200.00
Smg Barat	124783.00	14903.00	1590.00	2603.00	0.00	158668.00
Tugu	30421.00	173.00	12.00	7.00	0.00	31279.00
Ngaliyan	108905.00	6077.00	824.00	787.00	96.00	122555.00
Kota Semarang	1312564.00	110753.00	18435.00	10537.00	2281.00	1572105.00

Sumber: <http://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/3>

b. Jenis Kelamin

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Kota Semarang sesuai Jenis Kelamin
Tahun 2011-2013

No.	Jenis Kelamin	2011		2012		2013	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%
1.	Laki-laki	767.884	49,73	775.793	49,76	781.176	49,69
2.	Perempuan	776.474	50,27	783.405	50,24	790.929	50,31
	Jumlah	1.544.358	100	1.559.198	100	1.572.105	100

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2014, BPS Kota Semarang

Dari tahun 2011 hingga 2013, jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan selalu lebih banyak dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki, walaupun selisihnya selalu kecil, yaitu hanya sampai pada angka

dibawah 1%. Kondisi ini mensyaratkan bahwa pembangunan harus berbasis gender, harus lebih responsif terhadap kepentingan dan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan daerah lebih dikedepankan dan diutamakan, agar sasaran pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya dapat terpenuhi.

c. Pendidikan

Berdasarkan tujuan kedua MDG's yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua, yang dijabarkan ke dalam tiga indikator utama yaitu : 1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, 2) Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan pendidikan dasar 9 tahun dan 3) angka melek huruf perempuan dan laki-laki pada usia muda yaitu 15 -24 tahun. Gambaran posisi capaian tujuan ke-2 MDG's di Kota Semarang dikemukakan sebagai berikut (<http://singakin.semarangkota.go.id/2015/website/web/pages/68>):

Tabel 2.7

Status Capaian Tujuan ke-2 MDG's Kota Semarang

Indikator	Acuan Dasar	Kondisi Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber Data
Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk semua					
Target 2 A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar					
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI	89,68% (2009/2010)	90,55% (2010/2011)	100%	Dinas Pendidikan, BPS
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	79,53% (2009/2010)	76,43% (2010/2011)	100%	Dinas Pendidikan, BPS
3	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/ MI	99,91% (2009/2010)	99,77% (2010/2011)	100%	Dinas Pendidikan
4	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SMP/MTs	97,98%	99,54%	100%	Dinas Pendidikan
5	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	P: 99,96% L: 99,97% 2010	P: 100% L: 100% 2011	100%	Dinas Pendidikan, BPS

2.3 Profil Ekonomi Kota Semarang

Deskripsi Kota Semarang dilihat dari bidang ekonomi dijelaskan melalui berbagai data yang terkait, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Data penduduk berdasarkan Kelompok Usia dan Usia Produktif

Kondisi usia penduduk akan berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Dengan mengetahui dan mendasarkan pada data kependudukan berdasarkan pada kelompok usia, pengambil kebijakan akan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Bagaimana kondisi data kependudukan Kota Semarang berdasarkan kelompok usia, tabel berikut ini akan mendeskripsikannya.

Tabel 2.8
Data Penduduk Menurut Kelompok Usia
Dan Jenis Kelamin Di Kota Semarang Tahun 2013

No.	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	0-4	65,631	60,246	125,876
2.	5-9	65,099	59,980	125,079
3.	10-14	62,640	58,791	121,431
4.	15-19	71,021	74,644	145,665
5.	20-24	76,398	77,705	154,103
6.	25-29	73,987	74,578	148,564
7.	30-34	68,859	69,535	138,394
8.	35-39	61,316	63,031	124,347
9.	40-44	57,042	61,032	118,074
10.	45-49	50,860	54,908	105,768
11.	50-54	44,775	44,900	89,675
12.	55-59	33,420	30,606	64,025
13.	60-64	17,757	18,806	36,562
14.	65+	32,373	42,167	74,540
	Jumlah	781,176	790,929	1,572,105

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2014, BPS Kota Semarang

Pada tabel di atas dapat dibaca bahwa penduduk usia produktif (yang menurut ukuran BPS berada di Kelompok Usia 15-64 tahun) di Kota Semarang berada pada posisi dominan. Penduduk usia produktif merupakan kelompok usia yang terlibat aktif dalam lapangan pekerjaan. Komposisi kependudukan dimana kelompok usia produktif berada di posisi dominan merupakan komposisi yang ideal dan menguntungkan karena berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi Daerah yang baik, dimana penduduk usia produktif yang bekerja akan berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa. Asumsinya adalah bahwa jumlah kelompok usia produktif disuatu wilayah dapat berdampak positif (sebagai aset SDM) jika mereka bekerja. Sebaliknya jika kelompok usia ini berada pada kondisi tidak bekerja alias pengangguran, maka justru dampak negatif yang akan muncul. Asumsi ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun (1962:98-103) mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran ini, yaitu semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi.

2.3.2 Rasio Ketergantungan, Tingkat Partisipasi Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka dan

Komposisi penduduk usia produktif yang cukup baik di Kota Semarang, diikuti dengan rasio ketergantungan yang cukup tinggi karena komposisi penduduk usia <15 >64 sejumlah 28,39 % pada tahun 2012 dan bergerak turun hanya 0,01% saja pada tahun 2013. Kondisi ini tentunya akan berpengaruh terhadap besarnya angka ketergantungan penduduk pada penduduk usia produktif, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Kota Semarang sesuai Jenis Umur dan Rasio Ketergantungannya, Tahun 2012-2013

No.	Jumlah Penduduk (Usia)	Tahun 2012			Tahun 2013*)		
		Org.	%	Rasio Ketergantungan	Org.	%	Rasio Ketergantungan
1	<15 >64	442.719	28,39	39,63	446.190	28,38	39,65
2	15-64	1.116.479	71,61		1.125.915	71,62	
		1.559.198	100		1.572.105	100	

Sumber BPS Kota Semarang

*) Data belum rilis/ asumsi prediksi Bappeda/ Angka sangat sementara

Kondisi ini akan menjadi lebih bermasalah lagi disebabkan oleh tingkat pengangguran, walaupun peningkatan angka penganggurannya mengalami penurunan (relatif kecil sekali jauh dibawah 1%) per tahunnya. Tabel berikut akan menjelaskan kondisi tersebut.

Tabel 2.10
Nilai TPAK-TPT Kota Semarang Tahun 2011-2013

No.	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013*
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,90 %	67,91 %	69,85 %
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,92 %	5,82 %	5,40 %

Sumber : Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Th. 2012, BPS Kota Semarang

*) Data belum rilis/ asumsi prediksi Bappeda/ Angka sangat sementara

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa besarnya tingkat pengangguran berhubungan erat dengan tersedianya kesempatan kerja. Mestinya, penambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap penambahan angkatan kerja. Walaupun dalam tabel di atas, ada penurunan TPT Tahun 2013 dari tahun-tahun sebelumnya, namun angka 5,40 masih merupakan angka pengangguran yang tinggi. Kondisi ini dapat pula disebabkan karena kondisi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kota Semarang (dibawah tamatan SMA yang cukup tinggi, sebagaimana tabel 2.6 diatas), sehingga kualitas atau *grade* pendidikan yang tidak sesuai atau bisa menjawab kebutuhan kerja. Apalagi kondisi ini diperburuk lagi dengan data rasio ketergantungan di Kota Semarang juga cukup tinggi dan cenderung tidak atau sedikit mengalami perubahan dari tahun 2012 ke 2013, sebagaimana tabel berikut ini.

Dengan demikian maka penyelesaian permasalahan tersebut diantaranya adalah dengan langkah-langkah yang harus terus diupayakan dalam penyediaan lapangan

pekerjaan, baik secara kuantitas maupun kualitas, salah satunya melalui pendidikan atau pelatihan formal maupun informal.

2.3.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan

Penduduk Kota Semarang dengan mata pencaharian sebagai buruh industri jumlahnya paling banyak, yaitu 176.635 orang (25,7%), kemudian disusul PNS/TNI/POLRI sejumlah 94.748 orang (13,8%) dan Pedagang 86.175 orang (12,5%). Kondisi ini tentu dapat dipahami sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar, dimana sarat dengan kegiatan di bidang industri dan bisnis. Gambaran dalam bentuk tabel terkait jumlah penduduk berdasarkan sebaran mata pencaharian tersebut adalah sebagai berikut (<http://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/10>):

Tabel 2.11

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian di Kota Semarang, Tahun 2013

Kecamatan	Petani Sendiri	Buruh Tani	Nelayan	Pengusaha	Buruh Industri	Buruh Bangunan	Pedagang	Angkutan	PNS & TNI/Polri	Pensiunan	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mijen	4000.00	5873.00	0.00	210.00	6209.00	3631.00	1343.00	291.00	884.00	424.00	27.00	22892.00
Gunungpati	5493.00	0.00	17.00	229.00	7273.00	6171.00	1801.00	263.00	2169.00	482.00	3027.00	26924.00
Banyumanik	2483.00	0.00	0.00	1102.00	1633.00	8763.00	4099.00	519.00	12528.00	1645.00	2128.00	34899.00
Gajahmungkur	0.00	25.00	0.00	362.00	2075.00	1540.00	2007.00	484.00	3167.00	1096.00	5707.00	16463.00
Smg Selatan	0.00	0.00	0.00	10153.00	9373.00	48.00	6704.00	354.00	8474.00	4223.00	6739.00	46067.00
Candisari	0.00	0.00	0.00	546.00	9144.00	10041.00	5999.00	2073.00	11783.00	3823.00	5209.00	48618.00
Tembalang	538.00	444.00	0.00	99.00	528.00	528.00	3532.00	1857.00	5648.00	2628.00	26144.00	41944.00
Pedurungan	1057.00	1702.00	0.00	3581.00	30863.00	18239.00	9825.00	4247.00	17117.00	3108.00	18946.00	108685.00
Genuk	6635.00	3018.00	61.00	127.00	18917.00	5940.00	5308.00	1071.00	2400.00	564.00	2737.00	46778.00
Gayamsari	115.00	0.00	104.00	251.00	20823.00	8971.00	6460.00	1104.00	2672.00	603.00	125.00	41228.00
Smg Timur	0.00	0.00	0.00	3373.00	13375.00	3476.00	17021.00	4141.00	2731.00	1120.00	122.00	45361.00
Smg Timur	0.00	0.00	1875.00	12371.00	8702.00	1975.00	4513.00	1245.00	2275.00	2284.00	11.00	35251.00
Smg Tengah	0.00	0.00	0.00	2877.00	4302.00	2561.00	5415.00	2136.00	2704.00	1856.00	1.00	21853.00
Smg Barat	117.00	107.00	141.00	12297.00	18530.00	3216.00	4588.00	2506.00	7327.00	4618.00	535.00	53982.00
Tugu	780.00	2438.00	458.00	523.00	4243.00	1976.00	1204.00	192.00	646.00	0.00	8727.00	21188.00
Ngaliyan	5722.00	4926.00	0.00	5058.00	20645.00	5692.00	6358.00	3069.00	12221.00	11249.00	1519.00	76458.00
Kota Semarang	26940.00	18534.00	2657.00	53160.00	176635.00	82766.00	86175.00	25553.00	94748.00	39723.00	81702.00	688593.00

Jika diatas disebutkan bahwa Kota Semarang sebagai kota industri yang dipotretkan dengan jumlah penduduk yang terbanyak adalah bermatapencaharian sebagai Buruh Industri, maka sebagai buruh tentunya tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini terbaca dari data yang menyebutkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan pekerja di Kota Semarang adalah tamat SMA 316.436 orang atau 36,5%. Dengan selisih angka yang cukup jauh kemudian disusul pekerja dengan tingkat pendidikan SMP, yaitu sejumlah 195.948 orang atau 22,6 % dan di peringkat 3 adalah pekerja dengan pendidikan SD, yaitu 124.330 orang atau 14,4 %. Tentu hal ini cukup memprihatinkan dan menjadi faktor penyebab pekerja tidak mampu bersaing atau memenuhi kebutuhan kualitas tenaga kerja di pasar. Gambaran kondisi pekerja menurut tingkat pendidikan secara lengkap tersaji dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2.12

**Banyaknya Pekerja Dirinci Menurut Pendidikan
Di Kota Semarang, Tahun 2013**

Kecamatan	2013 Banyaknya Pekerja menurut Pendidikan (Jiwa)				
	SD	SMP	SMA	D1- D2- D3	D4 - S1
1	2	3	4	5	6
Mijen	3508.00	2035.00	12983.00	9687.00	6040.00
Gunungpati	4135.00	4217.00	10587.00	4468.00	4785.00
Banyumanik	8645.00	10010.00	23495.00	16860.00	25706.00
Gajahmungkur	603.00	17454.00	27714.00	9211.00	4732.00
Smg Selatan	3753.00	6523.00	12682.00	5079.00	5461.00
Candisari	1357.00	8294.00	16031.00	9992.00	6015.00
Tembalang	19150.00	27449.00	31373.00	6044.00	7619.00
Pedurungan	9118.00	20053.00	34523.00	8864.00	5271.00
Genuk	11589.00	10588.00	16225.00	4747.00	4382.00
Gayamsari	5732.00	10223.00	17356.00	5957.00	5715.00
Smg Timur	9844.00	10734.00	17043.00	4512.00	5438.00
Smg Timur	13796.00	13899.00	30850.00	5401.00	5418.00
Smg Tengah	5265.00	15068.00	9692.00	4468.00	3665.00

1	2	3	4	5	6
Smg Barat	10261.00	20135.00	32718.00	12959.00	10660.00
Tugu	3520.00	4487.00	5714.00	1506.00	1455.00
Ngaliyan	14054.00	14779.00	17450.00	8420.00	8519.00
Kota Semarang	124330.00	195948.00	316436.00	118175.00	110881.00

Sumber: <http://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/7>

2.3.4 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. Berikut beberapa tabel yang menggambarkan pertumbuhan PRDB di Kota Semarang.

a. PDRB atas dasar harga konstan

Berdasarkan pada indikator PDRB atas dasar harga konstan, pertumbuhan PDRB tertinggi ada pada lapangan usaha bidang Perdagangan, Hotel dan Restoran, yaitu mencapai 31,30 %, mengalami kenaikan 0,29% dari tahun 2012. Sedangkan usaha bidang Industri dan Pengolahan menempati peringkat kedua, berada pada angka prosentasi 26,36%, mengalami penurunan 0,22 % dari tahun 2012. Adapun peringkat ketiga ada pada usaha bidang Bangunan, yaitu 15,57 %, mengalami kenaikan 0,08 % dari tahun sebelumnya. Berikut tabel yang akan memperjelas tentang kondisi PDRB atas dasar harga konstan tersebut.

Tabel 2.13
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2013

No.	Lapangan Usaha	2012 *) (dalam jutaan)	%	2013 **) (dalam jutaan)	%
1.	Pertanian	246.649,51	1,02	248.028,30	0,97
2.	Pertambangan dan Penggalian	33.799,64	0,14	34.222,00	0,13
3.	Industri dan Pengolahan	6.432.298,02	26,58	6.750.992,29	26,36
4.	Listrik Gas, dan Air Bersih	294.792,96	1,22	305.343,85	1,19
5.	Bangunan	3.747.765,85	15,49	3.986.401,22	15,57
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7.522.659,90	31,09	8.015.473,75	31,30
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	2.314.801,61	9,57	2.440.468,17	9,53
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	661.403,13	2,73	702.266,69	2,74
9.	Jasa-jasa	2.942.317,15	12,16	3.125.332,87	12,20
Jumlah :		24.196.487,78	100	25.608.529,15	100

*) Sumber PDRB Kota Semarang Th. 2012, BPS Kota Semarang

**) Data belum rilis/ asumsi prediksi Bappeda/ Angka sangat sementara

<http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wp-content/uploads/2014/07/rkpd-2015-full-fix.pdf>

b. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku

Di Kota Semarang, Hotel dan Restoran tetap menjadi sektor yang paling dominan disusul dengan sektor Industri dan Pengolahan serta sektor Bangunan. Kondisi ini semakin menegaskan posisi Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tiap sektor pembentuk PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 – 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2013

No.	Lapangan Usaha	2012 *) (dalam jutaan)	%	2013 **) (dalam jutaan)	%
1.	Pertanian	588.074,44	1,08	627.301,59	1,02
2.	Pertambangan dan Penggalian	81.153,57	0,15	86.553,32	0,14
3.	Industri dan Pengolahan	13.396.296,80	24,63	15.121.999,80	24,66
4.	Listrik Gas, dan Air Bersih	776.041,22	1,43	860.675,61	1,40
5.	Bangunan	10.562.309,17	19,42	11.797.229,92	19,24
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15.460.952,20	28,43	17.614.828,33	28,73
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5.091.566,72	9,36	5.703.089,07	9,30
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.452.004,58	2,67	1.634.369,03	2,67
9.	Jasa-jasa	6.976.255,85	12,83	7.870.954,19	12,84
Jumlah :		54.384.654,53	100	61.317.000,86	100

*) Sumber PDRB Kota Semarang Th. 2012, BPS Kota Semarang

**) Data belum rilis/ asumsi prediksi Bappeda/ Angka sangat sementara
<http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wp-content/uploads/2014/07/rkpd-2015-full-fix.pdf>

- c. Laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tiap sektor pembentuk PDRB atas dasar harga konstan.

Seiring dengan kondisi makro ekonomi secara nasional, kondisi perekonomian Kota Semarang di tahun 2013 mengalami tekanan, meskipun masih tumbuh dibanding tahun 2012. Meskipun mengalami penurunan dibanding tahun 2012, di tahun 2013 perekonomian Kota Semarang (berdasarkan PDRB ADHK) masih dapat tumbuh sebesar 5,84%.

Di tengah situasi perekonomian yang mengalami tekanan sepanjang triwulan II karena kenaikan harga BBM dan pengetatan moneter oleh Bank Sentral. Kecuali sektor Bangunan, seluruh sektor pembentuk PDRB mengalami penurunan pertumbuhan, termasuk sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor utama pembentuk PDRB Kota Semarang. Tabel

berikut akan memperjelas gambaran laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tiap sektor pembentuk PDRB atas dasar harga konstan tersebut.

Tabel 2.15

**Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Tiap Sektor
Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2013**

No.	Lapangan Usaha	2012 *) (dalam jutaan)	%	2013 **) (dalam jutaan)	%
1.	Pertanian	2,78	1,74	0,54	0,56
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,83	2,33	1,96	1,25
3.	Industri dan Pengolahan	4,90	5,50	6,36	4,95
4.	Listrik Gas, dan Air Bersih	4,16	4,78	3,76	3,58
5.	Bangunan	7,17	7,04	6,03	6,37
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,93	6,67	7,08	6,55
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,87	6,06	5,61	5,43
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,19	5,56	7,44	6,18
9.	Jasa-jasa	7,46	8,15	6,67	6,22
Jumlah :		5,87	6,41	6,42	5,84

*) Sumber PDRB Kota Semarang Th. 2012, BPS Kota Semarang

**) Data belum rilis/ asumsi prediksi Bappeda/ Angka sangat sementara

<http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wp-content/uploads/2014/07/rkpd-2015-full-fix.pdf>

d. PDRB per Kapita

Ditinjau dari jumlah PDRB Perkapita (atas dasar harga berlaku) pada tahun 2011-2013, Kota Semarang mengalami peningkatan pada tahun 2013. Jika di tahun 2012, nilainya sebesar Rp. 34.787.877,69, di tahun 2013 nilainya meningkat menjadi Rp.39.124.435,42. Peningkatan nilai PDRB per kapita ini secara umum menandakan adanya tingkat pendapatan masyarakat yang lebih baik, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Semarang

2.3.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Dengan menggunakan indikator tersebut, berikut tabel yang akan menggambarkan perkembangan kondisi atau tingkat IPM di Kota Semarang.

Tabel 2.16
Indeks Pembangunan Manusia Series Tahun 2007 s.d. 2013
Kota Semarang

IPM Kota Semarang	
2007	71,9
2008	72
2009	76,9
2010	77,11
2011	77,42
2012	77,98
2013	78,54

Sumber: <http://semarangkota.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab3>

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Semarang sejak 2007 hingga 2013 selalu mengalami peningkatan.

2.3.6. Kemiskinan

Hasil Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015 diperoleh data warga miskin Kota Semarang sebesar 114.939 KK / 367.848 jiwa dengan rincian warga sangat miskin sebesar 39 KK / 105 jiwa, warga miskin sebesar 17.336 KK / 54.485 jiwa dan warga hampir miskin sebesar 97.564 KK / 313.258 jiwa. Prosentase warga miskin Kota Semarang jika dibandingkan dengan warga Kota Semarang per tanggal 30 april 2015 sebanyak 1.764.405 adalah sebesar 20,85%.

Jika dibandingkan dengan data hasil Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2013 terdapat Penurunan jumlah warga miskin sebesar 6.130 jiwa. Secara keseluruhan ada penurunan 0,64%, dimana pada pendataan Tahun 2013 menunjukkan bahwa 21,49 % penduduk Kota Semarang tergolong miskin dan dari Hasil Sementara Tahun 2015 menunjukkan bahwa 20,85 % penduduk Kota Semarang tergolong miskin. Berikut tabel yang akan mempermudah gambaran terkait jumlah warga miskin di Kota Semarang tersebut.

Tabel 2.17

Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2011 – 2013

No.	Uraian	2011		2012		2013	
		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	Jiwa	(%)
1	Kota Semarang						
	versi Bappeda	448.398	26,44	448.398	26,44	373.978 *)	21,49
	versi BPS	88.453	5,68	81.900 **)	5,13	81.900 **)	5,13

*) Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/716 Tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2013

**) Versi BPS prov. Jateng update September 2012 (data update per bulan Maret dan September)
<http://simgakin.semarangkota.go.id/2015/website>

Pemerintah Kota Semarang memperhitungkan rasio kemiskinan di Kota Semarang didasarkan pada identifikasi dan verifikasi warga miskin yang dilakukan setiap 2 tahun sekali yang nantinya akan dituangkan kedalam Keputusan Walikota. Untuk tahun 2013 sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/716 Tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2013 jumlah warga

miskin mencapai 373.978 jiwa atau mencapai 21,49 %. Meski angka ini turun cukup signifikan dari tahun sebelumnya namun masih diperlukan usaha yang cukup keras bagi Pemerintah Kota Semarang untuk mencapai target indikator yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2010 - 2015. Sebagai bahan pertimbangan, berdasarkan data versi BPS Prov. Jateng, September 2012 rasio penduduk miskin Kota Semarang hanya menyentuh angka 5,13 % dan bahkan jauh lebih rendah bila dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai rasio 14,98% di tahun yang sama.

Adapun terkait jumlah warga miskin dan sebarannya per kecamatan di Kota Semarang, khusus pada Tahun 2015, didapatkan data sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.18

Rekapitulasi Warga Miskin Kota Semarang, 2015

1. <u>SEMARANG TENGAH</u>	: 17.791	9. <u>GAJAHMUNGKUR</u>	: 15.705
2. <u>SEMARANG UTARA</u>	: 44.495	10. <u>TEMBALANG</u>	: 35.537
3. <u>SEMARANG TIMUR</u>	: 20.090	11. <u>BANYUMANIK</u>	: 14.428
4. <u>GAYAMSARI</u>	: 21.311	12. <u>GUNUNGPATI</u>	: 17.569
5. <u>GENUK</u>	: 25.513	13. <u>SEMARANG BARAT</u>	: 39.136
6. <u>PEDURUNGAN</u>	: 24.892	14. <u>MIJEN</u>	: 14.605
7. <u>SEMARANG SELATAN</u>	: 21.477	15. <u>NGALIYAN</u>	: 21.372
8. <u>CANDISARI</u>	: 24.220	16. <u>TUGU</u>	: 9.607

Sumber: <http://simgakin.semarangkota.go.id/2015/website>

2.4 Profil Politik Kota Semarang

Dalam menggambarkan profil politik Kota Semarang, terkait dengan penelitian ini, maka akan dilakukan melalui penjelasan tentang bagaimana peta kekuatan politik, pemilukada dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di Kota Semarang.

2.4.1 Peta Kekuatan Politik dan Pemilukada Kota Semarang

Reformasi membawa angin segar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, yang diantaranya terwujud dengan rakyat diikutkan langsung dalam pemilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif maupun Pemilu Kepala Daerah. Adapun kehidupan partai politik juga sangat berwarna dengan diberlakukannya sistem multi partai dan PDIP sebagai nama baru dari PDI yang selalu menjadi partai terpinggirkan saat Orde Baru, berubah menjadi partai besar dan kuat yang diperhitungkan dalam kehidupan politik, tidak saja secara nasional tetapi juga di daerah, termasuk di Kota Semarang, dimana dalam beberapa kali Pemilu Legislatif, PDIP memperoleh suara yang walau tidak menguasai mayoritas, tetapi menjadi pemenang Pemilu (kecuali Pemilu 2009). Berikut Tabel di bawah ini menyajikan gambaran kondisi tersebut.

Tabel 2.19

Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu DPRD Kota Semarang

No.	Partai Politik	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014
1.	Nasdem	-	-	1 (2%)
2.	PKB	4 (8.8%)	2 (4%)	4 (8%)
3.	PKS	5 (11,1%)	6 (12%)	6 (12%)
4.	PDIP	12 (26,6%)	9 (18%)	15 (30%)
5.	Golkar	6 (13.3%)	5 (10%)	5 (10%)
6.	Gerindra	-	4 (8 %)	7 (14%)
7.	Demokrat	7 (15,5%)	16 (32%)	6 (12%)
8.	PAN	6 (13,3%)	6 (12%)	4 (8%)
9.	PPP	2 (4.4%)	1 (2%)	2 (4%)
10.	Hanura	-	1 (2%)	-
11.	PDS	3 (6,6%)	-	-
	Jumlah Kursi	45	50	50
	Perempuan	6 (13,3%)	9 (18%)	11 (22%)

Sumber: KPU Kota Semarang (diolah)

Pada Tabel diatas terlihat bahwa peta kekuatan partai politik di Kota Semarang, yaitu bahwa mesti PDIP sempat kalah di Pemilu Legislatif Tahun 2009, namun di Pemilu Legislatif 2014 tidak hanya merebut lagi kemenangannya tetapi perolehan suaranya jauh meninggalkan Partai Demokrat yang sempat mengalahkannya pada Pemilu Legislatif 2009.

Kemenangan di Pemilu Legislatif 2014 ini juga akan sangat menentukan kekuatan politik PDIP di Pemilukada (serentak se Indonesia tahap pertama) di Kota Semarang. Sebab, dia akan menjadi satu-satunya partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusulkan pasangan calon walikota dan wakil walikota secara mandiri pada Pemilukada 2015 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 nanti, sebagaimana aturan yang mengaturnya yaitu Pasal 40 (1) UU No. 8 Tahun 2015, yang berisi sebagai berikut:

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dengan peta kekuatan seperti ini, maka PDIP dapat berpeluang untuk menang dalam pemilukada. Namun demikian kekuatan suara di Pemilu Legislatif dan kemandian dalam mengusung calon kepala daerah ini ternyata tidak berkorelasi positif dengan kemenangan PDIP dalam Pemilukada di Kota Semarang. Tabel berikut di bawah akan dapat menggambarkan kondisi tersebut.

Tabel 2.20

**Partai Pemenang Pemilu Legislatif dan Nama, Partai Pengusung serta
Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilukada Kota Semarang 2005 dan 2010**

Partai Pemenang Pemilu Legislatif	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara	%
2005				
PDIP: 12 kursi atau 26,6%	Sukawi Sutarip-Mahfudz Ali	PAN, PKB, PPP	468.003	74,14
	Soediro Atmo Prawiro - Ahmad Musyafir	Partai Demokrat	Tidak tersedia data	15,00
	Soendoro-R. Yuwanto	PDIP	Tidak tersedia data	3,58
	Bambang Raya Saputra - Siti Chomsiyati Sutrisno Suharto	Partai Golkar dan PDS	Tidak tersedia data	7,36
	Jumlah Suara Sah		631.208	94,93
2010				
Partai Demokrat 16 kursi atau 32%	Mahfudz Ali-Anis Nugroho Widharto	Partai Demokrat	191.427	31,05
	Harini Krisniati-Ari Pubono	Partai Gerindra dan PKS	58.394	9,4
	Bambang Raya Saputra-Kristanto	Partai Golkar, PDS, PKPI, PKPB, PKDI, PBN, PMB, PPDI, PNBKI, PPD, PPI, PIS, Partai Buruh dan Partai Kedaulatan	103.482	16,79
	M. Farchan - Dasihi Ardiyantari	PPP, PAN, PKB	51.854	8,31
	Soemarmo HS-Hendi Hendrar Priyadi	PDIP	211.323	34,28
Jumlah Suara Sah			616.480	

Sumber: KPU Kota Semarang (diolah)

Pada Tabel diatas dapat dibaca bahwa jika pada Pemilukada 2005, PDIP dengan percaya diri yang tinggi sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2004, maju sendiri atau mandiri dalam mengusung pasangan calon kepala daerah, tetapi dapat dikalahkan oleh partai politik peserta pemilu yang berkoalisi, yaitu PAN, KB dan PPP. Namun pada Pemilu Legislatif 2009 dimana PDIP mengalami kekalahan dari Partai Demokrat, justru PDIP dapat memenangkan pasangan pemilukada yang diusungnya secara mandiri, tidak berkoalisi dengan partai lain. Jadi, penentuan pemenang pemilukada di Kota Semarang tidak berkorelasi positif dengan kemenangan dan perolehan kursi yang banyak oleh suatu partai politik pada Pemilu Legislatif serta sistem kemandirian dalam mengusung calon kepada daerah. Tentu terdapat faktor-faktor lain yang lebih determinan menentukan kemenangan calon kepala daerah, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Fifriyah dan Hermi S (2010) yang menyebutkan bahwa faktor personality menjadi faktor determinan kemenangan Soemarmo HS dalam Pemilukada 2010 di Kota Semarang.

Kemenangan di Pemilu Legislatif tapi justru mengalami kekalahan di Pemilukada, atau sebaliknya, mengalami kekalahan di Pemilu Legislatif tetapi justru dapat memenangkan Pemilukada ini harus menjadi rambu-rambu yang mendapatkan perhatian besar bagi partai politik, khususnya PDIP dalam menghadapi Pemilukada Kota Semarang yang akan digelar pada 9 Desember 2015.

2.4.2 Partisipasi Politik Masyarakat Kota Semarang Dalam Pemilukada

Alam demokrasi diwarnai oleh peran serta warga negara dalam bernegara dan berbangsa, diantaranya dalam wujud ikut serta atau berpartisipasi dalam menentukan pemimpin melalui pemilu, baik pada Pemilu Presiden, Pemilukada maupun Pemilu Legislatif di tingkat Pusat maupun Daerah. Kegiatan memberikan suara dalam pemilu dapat menjadi salah satu indikator untuk mengukur bagaimana tingkat partisipasi pemilih pada pemilu. Terkait dengan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilukada, di Kota Semarang, jika membandingkan Pemilukada 2005 dengan 2010, terdapat data yang menerangkan bahwa terjadi

peningkatan dalam hal jumlah pemilih, yaitu dari 999.693 menjadi 1.100.337 orang pemilih, namun dalam hal jumlah yang menggunakan hak pilihnya mengalami penurunan, yaitu dari 664.897 menjadi 660.851 orang. Artinya, dalam Pemilukada 2010 terjadi penurunan partisipasi politik masyarakat Kota Semarang dalam Pemilukada. Tabel berikut di bawah ini akan memberikan gambaran secara lebih detail tentang kondisi penurunan angka partisipasi warga masyarakat Kota Semarang dalam Pemilukada.

Tabel 2.21
Jumlah Pemilih, Partisipasi dan Suara Sah
Pilkada Kota Semarang Tahun 2005 dan Tahun 2010

Pilkada	Jumlah Pemilih	Pemilih Yang Menggunakan Hak pilih		Suara Sah		Suara Tidak Sah	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2005	999.693	664.897	66,51	631.208	94,93	33.689	5,07
2010	1.100.337	660.851	60,06	616.480	93,29	44.371	6,71

Sumber: KPU Kota Semarang (diolah)

BAB III

PANDANGAN WONG CILIK TERHADAP PEMILUKADA

DI KOTA SEMARANG

Pada Bab III ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab pertama akan menyajikan data lapangan yang didapatkan melalui metode survey terhadap responden dan *indept interview* terhadap informan. Kemudian sub bab kedua adalah analisis terhadap data lapangan yang dihasilkan.

3.1 Penyajian Data Penelitian

3.1.1 Identitas Responden dan Informan

Data dalam penelitian ini didapatkan dari 2 sumber, yaitu orang sebagai responden dan orang sebagai informan. Responden adalah untuk kepentingan data survey, sedangkan informan adalah untuk data kualitatif yang digunakan untuk mempertajam, memperdalam atau menguatkan analisis data survey. Gambaran tentang identitas responden dan informan disampaikan melalui 5 indikator, yaitu sebaran responden berdasarkan wilayah geografis, jenis kelamin, umur, agama, suku bangsa, pendidikan, mata pencaharian dan afiliasi partai politik, dengan penekanan bahwa mereka semua merupakan masyarakat kelas bawah, kelas yang hidup dibawah garis kemiskinan (*under the poverty lines*), kelas yang memiliki pendapatan sama dengan atau dibawah Upah Minimal Regional (UMR) Kota Semarang, atau yang dikenal dengan sebutan kelas *grass root community* (*Wong Cilik*). Data yang dihasilkan terkait identitas responden-informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Identitas Responden – Informan Berdasarkan Sebaran Wilayah Geografis

Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang, adapun informannya berjumlah 10 orang, yang tersebar ke dalam 5 wilayah berdasarkan letak peta geografis Kota Semarang, dengan pembagian setiap bagian wilayah

diambil 20 orang responden dan 2 informan. Data terkait identitas responden-informan berdasarkan sebaran wilayah disusun dengan tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3.1
Sebaran Responden-Informan Berdasarkan Peta Geografis Kota Semarang

Wilayah Berdasarkan Peta Geografis	Jenis Kelamin				Jumlah
	Responden		Informan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Barat	15	5	2	0	22
Timur	17	3	1	1	22
Utara	11	9	2	0	22
Selatan	8	12	2	0	22
Tengah	12	8	1	1	22
Total:	63	37	8	2	110

Mayoritas responden dan informan adalah berjenis kelamin laki-laki. Hal ini bisa dipahami karena pengaruh sistem sosial *patriarch* yang hidup dan dilakukan di Indonesia, yaitu bahwa secara umum laki laki harus bekerja disektor publik, sedang wanita bekerja disektor domestik, menyebabkan dalam hal pengambilan keputusan dan pembagian kerja maka laki-laki lebih diperhitungkan dan menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan perempuan (walaupun dia bekerja di luar rumah) tetapi tugas utamanya adalah tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan di dalam rumah, seperti ungkapan yang diberikan kepada kaum perempuan, yaitu M3 yang terdiri dari *Manak*, *Masak* dan *Macak* (melahirkan, masak dan berhias). Jika perempuan bekerja maka diterima sebagai membantu suami mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan demikian maka tidak dapat terhindari bahwa responden dan informan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak ditemui dan sesuai dengan penelitian ini yang terkait dengan pengambilan keputusan dan klasifikasi indikator *Wong Cilik* yang *base on* ekonomi (penghasilan, *income*). Namun responden – informan berjenis kelamin

perempuan juga tidak akan dihindari karena jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan hampir sama dengan laki-laki, sehingga meskipun sedikit bisa mewakili suara perempuan guna untuk penguatan analisis data dalam penelitian ini.

b. Identitas Responden – Informan Berdasarkan Agama

Berikut adalah tabel yang menggambarkan identitas responden-informan berdasarkan agama yang dipeluknya.

Tabel 3.2
Sebaran Responden-Informan Berdasarkan Agama

Wilayah Berdasarkan Peta Geografis	Agama					Jumlah
	Islam	Kristen/Protestan	Budha	Hindu	Lainnya	
Barat	20	2	0	0	0	22
Timur	19	3	0	0	0	22
Utara	21	1	0	0	0	22
Selatan	20	2	0	0	0	22
Tengah	22	0	0	0	0	22
Total:	102	8	0	0	0	110

Tabel di atas menggambarkan bahwa mayoritas responden-informan beragama Islam (93%), kemudian disusul dengan yang beragama protestan (7%). Mayoritas responden-informan dalam penelitian ini yang mayoritas beragama Islam, ada kaitannya dengan jumlah penduduk Kota Semarang yang mayoritas memeluk agama Islam, sehingga temuan responden yang mayoritas beragama Islam tidak dapat dihindari.

c. Identitas Responden – Informan Berdasarkan Suku Bangsa

Semua responden-informan dalam penelitian ini adalah bersuku bangsa Jawa. Penduduk Kota Semarang memiliki keragaman suku bangsa, namun mayoritas adalah suku Jawa. Dibandingkan dengan warga negara Indonesia keturunan Asing lainnya (Arab, India), warga negara Indonesia keturunan China memiliki jumlah yang cukup besar di Kota Semarang, yaitu berada di urutan nomor dua. Sebagaimana penduduk etnis China di beberapa wilayah Indonesia yang secara ekonomis memiliki kehidupan relatif cukup

baik, karena sejarah yang menguntungkan mereka sebagai warga negara kelas 2 setelah pemerintah kolonial, sedangkan bangsa kita berada di kelas dibawahnya. Dalam penelitian ini batasan responden-informan adalah penduduk yang berada pada posisi *grass root* atau *Wong Cilik* dalam kategori *under the poverty lines*, yaitu berpenghasilan $\leq$ UMR Kota Semarang, maka walaupun jumlah penduduk etnis China cukup besar di Kota Semarang, namun tidak masuk kriteria untuk dijadikan responden-informan dalam penelitian ini.

d. Identitas Responden – Informan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan modal dan menentukan pekerjaan dan pendapatan seseorang. Berikut adalah tabel yang akan menjelaskan tingkat pendidikan responden-informan dalam penelitian ini.

Tabel 3.3
Identitas Responden-Informan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Responden	Informan
1	< SD	12	0
2	Tamat SD	46	0
3	Tamat SMP	30	4
4	Tamat SMA	12	6
5	Lainnya	0	0
Total:		100	10

Pendidikan rendah akan berpengaruh pada taraf kehidupan masyarakat. Akhirnya mereka tidak mampu bersaing atau berkompetisi di pasar kerja. Hidup dijalani dengan kehidupan yang keras dan berat, tetapi berpenghasilan yang rendah. Inilah gambaran bagaimana identitas responden-informan pada penelitian ini tergolong pada masyarakat bawah atau yang disebut dengan *Wong Cilik*. Data tentang identitas responden-informan berdasarkan mata pencaharian dan pendapatan akan memperjelas gambaran kondisi masyarakat yang tergolong sebagai *Wong Cilik* tersebut.

e. Identitas Responden – Informan Berdasarkan Mata Pencaharian

Sesuai batasan dalam penelitian ini, yaitu *Wong Cilik* yang memiliki penghasilan $\leq$ UMR Kota Semarang, maka batasan responden penelitian ini adalah mereka yang memiliki mata pencaharian sebagai tukang ojek, tukang becak, pengemudi taaxi, pedagang kaki lima, pengemis atau tua wisma dan lain-lain yang memiliki penghasilan yang terbatas. Adapun sebagai informan adalah orang dari kalangan *Wong Cilik* yang ditokohkan atau menjadi pemimpin/koordinator kelompoknya.. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, identitas responden-informan berdasarkan mata pencaharian mereka adalah sebagai berikut tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Identitas Responden-Informan Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	
		Responden	Informan
1	Tukang Becak	20	2
2	Tukang Ojek	30	3
3	Sopir Taxi	15	1
4	Pedagang Kaki Lima/ Pasar Tradisional	22	3
5	Pengemis/Tuna wisma	5	0
6	Tukang bangunan	8	1
Total:		100	10

- f. Identitas Responden – Informan Berdasarkan Tingkat Penghasilan
- Berdasarkan batasan bahwa yang disebut dengan kelompok atau komunitas *Wong Cilik* adalah komunitas masyarakat yang berada pada *under the poverty lines*, yang dalam hal ini adalah dengan penghasilan sebesar $\leq$ UMR Kota Semarang (Rp. 1.685.000). Dengan membuat kategorisasi penghasilan yang diperoleh responden-informan dalam pelitian ini, didapat identitas responnden-informan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.5

Identitas Responden-Informan Berdasarkan Besarnya Penghasilan

No.	Besarnya Penghasilan (RP.)	Jumlah	
		Responden	Informan
1	< 500.000	2	0
2	500.000 – < 750.000	3	1
3	750.000 - < 1.000.000	13	2
4	1.000.000 – < 1.250.000	43	2
5	1.250.000 – 1.685.000	39	5
Total:		100	10

Mayoritas responden (43%) berpenghasilan antara Rp. 1.000.000 sampai dengan kurang dari Rp. 1.250.000, disusul oleh responden yang berpenghasilan antara 1.250.000 hingga Rp. 1.685.000, yaitu sebesar 39%. Adapun sebagai informan, mayoritas berpenghasilan 250.000 hingga Rp. 1.685.000.

3.1.2 Pemahaman Makna Demokrasi

Pandangan dan opini politik rakyat adalah cara bagaimana rakyat memahami dan mengerti perihal politik, seperti demokrasi dan pemilu. Cara bagaimana rakyat memahami politik tersebut adalah tergantung pada bagaimana pengetahuan politik yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, data menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui dan memahami makna demokrasi yang sesungguhnya.

Tabel 3.6

Pemahaman Responden Terhadap Makna Demokrasi

No.	Tingkat Pemahaman	Frekuensi	%
1.	Paham	1	1
2.	Cukup paham	3	3
3.	Kurang paham	11	11
4.	Tidak paham	85	85
Jumlah :		100	100

Pada Tabel 3.6 terlihat bahwa 85 % responden tidak mengetahui atau memahami makna sesungguhnya dari konsep demokrasi. Data ini dikuatkan oleh informan HH² yang mengatakan bahwa:

“masyarakat miskin itu tidak tahu apa itu demokrasi....mau demokrasi atau tidak, bagi masyarakat tidak penting. Tapi keberadaan Negara dan Pemerintah itu penting karena bertugas melindungi masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat”

Jadi, masyarakat tidak merasa cemas ketidaktahuannya tentang makna demokrasi itu akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Namun mereka mengetahui dan mengakui akan penting dan utamanya aktor negara dan pemerintahan yang signifikan dan yang menentukan kualitas hidup dan kebutuhan mereka.

3.1.3 Masalah Penting dan Mendesak Kota Semarang

Permasalahan penting Kota Semarang dalam pandangan penduduk akan bervariasi. Kondisi sosial, ekonomi dan politik nya akan mendasari atau melatarbelakangi pandangannya. Ketika responden diminta menjawab dalam hal masalah umum yang dihadapi langsung oleh Kota, mayoritas dari mereka menjawab bahwa masalah ekonomi (45%; seperti pengangguran kota) dan kemiskinan (29%) sebagai dua masalah serius di kota Semarang. Data ini menunjukkan bahwa urusan ekonomi masalah dominan dalam pandangan masyarakat *grass root*. Ditegaskan oleh informan bahwa di Kota ini tidak mudah untuk mencari pekerjaan atau sulit untuk mempertahankan pekerjaan. Informan kunci MS³ tersebut adalah , pemimpin informal tukang becak, yang lebih lanjut mengatakan bahwa:

"penghasilan yang didapatkan untuk digunakan pada kehidupan di kota ini sangat berat. Hanya untuk memastikan bahwa kita mampu untuk makan tiga kali sehari juga tidak yakin. Kehadiran masyarakat mesin mengangkut seperti mobil, bus atau bahkan "ojek" (sepeda

² Wawancara dengan HH pada tanggal 1 Mei 2015, Jam 10.00, di Kec. Gayamsari, Kota Semarang.

³ Wawancara dengan MS pada tanggal 21 Mei 2015, jam 17.00, di Stasiun KA Tawang Kota Semarang.

motor digunakan sebagai transportasi bisnis) adalah mengganggu keberadaan "becak" kami".

Berikut secara lebih detail berbagai masalah penting menurut pandangan Wong Cilik di Kota Semarang.

Tabel 3.7

Pandangan Wong Cilik tentang Masalah Mendesak Kota Semarang

No.	Jenis Masalah	Jumlah
1.	Kemiskinan	29
2.	Ekonomi	45
3.	Kesehatan	3
4.	Infrastruktur (Jalan, Sarana & Prasarana)	7
5.	Keamanan/Ketertiban	9
6.	Penegakan Hukum	3
7.	Pendidikan	2
8.	Lainnya	1
9.	Tidak Jawab	1
Total :		100

Terbaca pada tabel di atas bahwa dalam pandangan responden, mayoritas menilai bahwa masalah ekonomi menjadi masalah yang paling penting, yang diikuti pada urutan kedua adalah masalah kemiskinan. Pandangan responden ini diperkuat oleh hampir semua informan dalam penelitian ini. Ungkapan yang disampaikan mereka hampir senada dengan informan AR⁴ yang mengatakan bahwa:

“kondisi perekonomian sekarang ini susah....gas, bensin dan barang-barang kebutuhan pokok naik terus, sedangkan kami hidup dalam kekurangan. Jadi sebaiknya masalah ekonomi dan kemiskinan harus diperhatikan pemerintah”.

Kondisi masyarakat *grass root* ini memiliki korelasi yang positif dengan dengan tingkat pendidikan responden yang mayoritas rendah serta mata pencaharian dengan kategori perolehan penghasilan yang rendah pula (lihat Tabel 3.3, 3.4 dan 3.5).

⁴ Wawancara dengan Pak AR pada tanggal 12 April 2015, jam 20.00 di Simpang Lima Kota Semarang

3.1.4 Media Publik Yang Sering Digunakan Dalam Mendapatkan Informasi Publik dan Pemilukada

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi berjalan pesat sekali, dimana masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik melalui UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana-prasarana masyarakat dalam mendapatkan informasi publik dapat melalui berbagai media. Gambaran media apa yang sering atau banyak digunakan oleh responden dalam penelitian ini adalah sebagaimana tersaji dalam bentuk tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3.8

Media Publik Paling Sering Digunakan Wong Cilik Kota Semarang

No.	Jenis Media Publik	Jumlah	
		Frekuensi	%
1	2	3	4
1.	TV	78	78,00
2.	Radio	6	6,00
3.	Internet	0	0,00
4.	Informasi dari teman pergaulan/paguyuban	2	2,00
5.	Media Pertemuan di RT/RW/Kelurahan	1	1,00
6.	Lainnya	0	0,00
7.	Tidak Jawab	1	1,00
Total :		100	100,00

Media TV merupakan media yang mayoritas digunakan oleh responden dalam mendapatkan berita atau informasi publik. Menurut informan BS⁵ pilihan pada media TV untuk mendapatkan informasi tersebut karena media TV akan lebih murah, mudah dan efektif diserap serta diberbagai tempat umum (misalnya warung makan, rumah sakit) biasanya tersedia. Media Dengan demikian maka media TV menjadi sumber utama dalam mendapatkan informasi-informasi, khususnya terkait politik. Namun dengan tingkat mayoritas pendidikan responden yang tergolong rendah, maka seringkali penangkapan berita begitu mentah atau

⁵ Wawancara dengan Pak BS pada tanggal 22 April 2015, jam 20.00 di Pasar Jati Banyumanik Kota Semarang

apa adanya. Dengan perkembangan media yang tidak netral lagi dalam memberikan informasi, menjadikan mereka mudah untuk tersesat dalam pemaknaan berita atau digunakan oleh kelompok (elit) kepentingan lain. Sedangkan penggunaan media yang lain tidak atau kurang digunakan karena seperti internet dan koran memerlukan biaya karena mereka harus bayar.

3.1.5 Pihak Yang Diajak Diskusi Dalam Menentukan Pilihan Politik

Dengan siapa responden berdiskusi tentang politik dan pilihan politik (baca: Pemilukada) dalam penelitian ini sangat variatif. Namun mayoritas responden mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan diskusi dengan siapapun dalam menentukan pilihan politik. Dengan kata lain, mereka otonom. Pada urutan kedua, respon menggunakan pilihan keluarga dalam menentukan pilihan politiknya. Adapun perbedaan dengan pihak-pihak lain yang berpengaruh dalam menentukan pilihan politik, jumlahnya jauh dari kategori otonom dan keluarga. Artinya adalah bahwa pilihan politik mayoritas responden dapat dirumuskan sebagai lebih pada “otonom dan personal kekerabatan”. Pada tabel berikut di bawah ini akan mendeskripsikan kondisi ini.

Tabel 3.9

Pihak yang paling sering diajak Wong Cilik berdiskusi dalam menentukan pemimpin

No.	Kategori “Pihak yang paling sering diajak diskusi”	Jumlah	
		Frekuensi	%
1.	Keluarga (suami/istri/kakak/adik/ortu/mertua)	29	29,00
2.	Ketua RT/RW/Kelurahan/Kecamatan	5	5,00
3.	Tokoh Masyarakat (Guru, PNS dll)	5	5,00
4.	Tokoh Agama (Kyai/Ulama, Guru Ngaji)	4	4,00
5.	Tokoh/Pengurus Partai Politik	0	0,00
6.	Teman Pergaulan	2	2,00
7.	Diskusi lewat media social	6	6,00
8.	Diri sendiri	48	48,00
9.	Lainnya	0	0,00
10.	Tidak Jawab	1	1,00
Total :		100	100,00

Data pada tabel tersebut diperkuat oleh informan JK⁶ yang mengatakan bahwa:

“orang susah itu mau apalagi.....adanya ya kerja, kerja dan kerja...tidak sempat bicara politik...kalau mau milih walikota ya ngomong-ngomongnya sama istri dan anak”.

Adapun kebanyakan informan senada mengatakan bahwa tidak pernah berdiskusi dengan siapapun dalam menentukan walikota, alias mereka menentukan sendiri.

3.1.6 Sifat Kepemimpinan Yang Diharapkan

Sesuai dengan kondisi sosial ekonomi *Wong Cilik* yang hidup dibawah garis kemiskinan, maka sifat kepemimpinan (Calon Walikota Semarang) yang diharapkan adalah pemimpin yang perhatian/peduli/empati pada rakyat, dengan jumlah 42% dan pemimpin yang jujur dan bisa dipercaya dengan jumlah 27%. Sebaliknya pemimpin yang bersih dari KKN, tegas dan pintar menjadi pilihan yang sedikit dan jauh selisihnya dengan 2 kategori pilihan sebelumnya. Berikut data yang tersaji dalam bentuk tabel berikut di bawah ini dapat menggambarkan kondisi tersebut.

Tabel 3.10

**Sifat kepemimpinan yang paling penting dimiliki
oleh Calon Walikota Semarang**

No.	Jenis Sifat Kepemimpinan	Jumlah	
		Frekuensi	%
1.	Jujur/Bisa dipercaya	27	27,00
2.	Perhatian/Peduli/Empati pada rakyat	42	40,00
3.	Bersih dari KKN	14	14,00
4.	Tegas	10	10,00
5.	Pintar dan bijaksana	7	7,00
Total :		100	100,00

⁶ Wawancara dengan Pak JK pada tanggal 11 April 2015, jam 15.00 di Meteseh Kota Semarang

Menurut informan TR⁷ dan GP⁸ dengan senada menyebutkan bahwa mereka tidak peduli bagaimanapun pemimpin itu, yang penting mengerti terhadap keadaan rakyatnya yang miskin.

3.1.7 Penilaian dan Respon Terhadap *Money Politics*

Euforia *money politics* sesungguhnya sudah ada sejak diselenggarakannya pemilihan kepala desa di Indonesia. Namun, era reformasi yang melahirkan demokrasi langsung dalam bentuk pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, yang salah satunya dimaksudkan untuk memangkas hubungan tidak sehat dan berbau politik uang antara calon kepala daerah dengan DPRD, ternyata tidak mampu untuk menghilangkan, tetapi justru telah memperluas adanya *money politics* dalam setiap pemilu, yaitu pada pemilukada, pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Tentu pandangan tentang penerimaan politik uang akan berbeda-beda. Dalam komunitas masyarakat dengan kategori kelompok *grass root* atau *Wong Cilik* pun pemberian politik uang akan dipandang dan disikapi berbeda-beda, sebagaimana terlihat dalam penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3.11
Pandangan Wong Cilik Tentang Kewajaran Pemberian Uang/Hadiah
Dalam Pemilukada Oleh Calon Walikota Semarang

No.	Kategori Pandangan	Jumlah	
		Frekuensi	%
1.	Pemberian uang bisa diterima sebagai hal yang wajar	81	81,00
2.	Pemberian uang tidak bisa diterima sebagai hal yang wajar	19	19,00
Total :		100	100,00

Bagi *Wong Cilik*, mayoritas responden mengatakan bahwa pemberian uang bisa diterima sebagai hal yang wajar. Tentu kondisi ini bisa dipahami bahwa karena

⁷ Wawancara dengan Pak TR pada tanggal 17 April 2015, jam 15.00 di Gunungpati, Kota Semarang

⁸ Wawancara dengan Pak GP pada tanggal 30 April 2015, jam 19.00 di Pedurungan Kota Semarang

Wong Cilik merupakan kelompok masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, maka ketersediaan atau tambahan uang bagi mereka sangat diharapkan. Data ini diperkuat oleh DR⁹ yang mengatakan bahwa:

“Yang mencalonkan diri itu kan punya uang banyak....jadi ya mumpung mereka butuh kita, kita terima saja uang yang diberikan.... kan kita nanti juga terpotong waktu kerjanya, alias terpotong juga penghasilan kita jualan di hari itu dan kadang juga anak-anak yang saya bawa minta jajanan saat pergi ke TPS...jadi kan lumayan pemberian uang dari calon itu bisa kita gunakan. Jadi wajar saja kalau kita menerima uang”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perilaku pemilih ini tergolong perilaku pragmatis. Asumsi ini diperkuat dengan Tabel berikut di bawah ini yang menggambarkan bagaimana mayoritas dari kelompok *Wong Cilik* mau menerima pemberian uang, bahkan perilaku mereka ini bisa dikategorikan sebagai perilaku yang sangat materialistik dan transaksionalistik, dimana mayoritas (42%) dari yang bersedia menerima pemberian uang akan memilih calon atau memberikan suaranya pada calon yang memberi uang/hadiah lebih besar. Perilaku egoistik juga muncul pula disini dan menembus angka yang besar pula (36%) dimana mereka bersedia menerima pemberian uang/hadiah tetapi urusan menentukan siapa yang akan dipilih dalam pemilu menjadi urusan rahasia mereka. Tabel berikut di bawah ini akan menyederhanakan penjelasan perilaku pemilih materialistik- transaksionalistik-egoistik tersebut di atas.

Tabel 3.12

**Respon Wong Cilik terhadap Pemberian Uang / Hadiah
Dalam Pemilukada Oleh Calon Walikota Semarang**

No.	Jenis Respon	Jumlah	
		Frekuensi	%
1	2	3	4
1.	Menerima dan akan memilih calon yang memberi uang/hadiah	21	21,00
2.	Menerima dan akan memilih calon yang memberi uang/hadiah lebih besar	42	42,00

⁹ Wawancara dengan Ibu DR pada tanggal 17 April 2015, jam 16.30 Pasar Genuk, Kota Semarang

1	2	3	4
3.	Menerima pemberian uang/hadiah, tetapi masalah memilih adalah urusan rahasia	36	36,00
4.	Tidak akan menerima pemberian uang/hadiah	1	1,00
Total :		100	100,00

Perilaku pemilih materialistik- transaksionalistik-egoistik juga diisyaratkan oleh pernyataan hampir semua informan¹⁰ yang menyebutkan bahwa pemberian uang adalah sebagai sebuah kewajiban, pemberian yang lebih banyak akan menjadi dasar preferensi dan masalah pilihan adalah merupakan urusan personal dan rahasia. Adapun besarnya nilai rupiah yang diharapkan dalam politik uang pada setiap pemilu oleh kelompok *Wong Cilik* berkisar dari Rp. 10.000 hingga Rp. 30.000, walaupun sebagian besar atau mayoritas responden (57%) memilih sejumlah uang Rp. 30.000, dan diurutan kedua (21%) adalah pemilih besaran sejumlah Rp. 20.000 untuk *vote buying*. Gambaran besaran uang yang diterima ini disajikan kembali dalam bentuk Tabel berikut ini.

Tabel 3.13

**Nilai Rupiah Dari Pemberian Calon Walikota Yang Diharapkan
Wong Cilik Dalam Pemilukada Kota Semarang**

No.	Besarnya Nilai Rupiah Yang Diharapkan (Rp.)	Jumlah	
		Frekuensi	%
1.	10.000	1	1,00
2.	15.000	4	4,00
3.	20.000	21	21,00
4.	25.000	8	8,00
5.	30.000	57	57,00
6.	Lainnya	9	9,00
7.	Tidak Menjawab	0	0,00
Total :		100	100,00

¹⁰ Kecuali Pak MH yang beranggapan bahwa menerima uang itu melanggar aturan negara. Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Mei 2015, jam 11 di Simpanglima Kota Semarang.

3.1.8 Pertimbangan Utama Dalam Memilih

Pertimbangan pemilih dalam memilih calon kepala daerah sangat variatif. Namun tentunya pasti akan ada pertimbangan yang utama yang mendasari pemilihannya, yang sifatnya bisa sangat personal. Pertimbangan-pertimbangan tersebut bisa karena dasar kepentingan ekonomis, sosial, politis dan lain-lain. Berikut tabel yang akan menggambarkan bagaimana *riset* lapangan menghasilkan dasar-dasar pertimbangan utama responden dalam memilih calon Walikota Semarang dalam Pemilukada Serentak 2015.

Tabel 3.14

Dasar Pertimbangan Utama Memilih Calon Walikota Semarang

No.	Jenis Dasar Pertimbangan	Jumlah	
		Frekuensi	%
1.	Pengalaman Calon Walikota	22	22,00
2.	Program (Visi dan Misi) Calon Walikota	42	42,00
3.	Popularitas Calon Walikota	7	7,00
4.	Kesamaan Organisasi/ Partai Politik	3	3,00
5.	Pemberian Uang/ Sembako/ Hadiah	25	25,00
6.	Lainnya	0	0,00
7.	Tidak Menjawab	1	1,00
Total :		100	100,00

Ternyata perilaku pemilih pada komunitas yang masuk dalam kategori *Wong Cilik* memiliki dasar pertimbangan utama yang baik dalam memilih calon pemimpinnya, yaitu sejumlah 42 % menjawab program (visi-misi) dan 22 % menjawab pengalaman calon Walikota. Walaupun yang memilih dasar pertimbangan utama memilih calon Walikota Semarang adalah karena pemberian uang/ sembako/hadiah jumlahnya juga besar, yaitu 25 %. Semua informan menyebutkan dengan pernyataan yang senada bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi kemiskinan itu menjadi tugas pemerintah. Oleh sebab itu dalam memilih calon harus dilihat pada program dan pengalaman calon. Dengan demikian maka dapat disebutkan bahwa alasan ekonomis dan politis lebih mendasari pemilihan kelompok *grass root society* terhadap pilihan calon Walikota Semarang dari pada alasan sosiologis atau psikologis.

3.1.9 Latar Belakang Profesi Walikota Yang Diharapkan

Latar belakang profesi Walikota yang diharapkan oleh kalangan *Wong Cilik* juga sangat beragam, yaitu pengusaha, birokrat/PNS, Ulama/Kyai, Akademisi/Pakar, Tentara/TNI/Polri dan lain-lainnya. Tabel berikut di bawah ini mendeskripsikan kondisi tersebut.

Tabel 3.15

Profesi Walikota Semarang Yang Dikehendaki Wong Cilik

No.	Profesi Calon Walikota Semarang Yang Dikehendaki	Jumlah	
		Frekuensi	%
1.	Pengusaha	26	26,00
2.	Birokrat / PNS	35	35,00
3.	Ulama / Kyai	3	3,00
4.	Akademisi / Pakar	11	11,00
5.	Tentara / TNI / POLRI	4	4,00
6.	Lainnya	20	20,00
7.	Tidak Menjawab	1	1,00
Total :		100	100,00

Dari berbagai varian latar belakang profesi Walikota Semarang yang dikehendaki oleh kalangan *Wong Cilik* adalah secara beurutan dari yang paling banyak dipilih responden adalah dari kalangan birokrat/PNS, kemudian disusul pengusaha dan lainnya. Bagi *Wong Cilik*, selama ini yang mereka ketahui adalah bahwa menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hidup mereka. Selama ini pula yang dikenal dan lebih dekat dengan mereka adalah pemerintah. Dengan demikian maka profesi birokrat/PNS menjadi pilihan utama. Preferensi responden ini sebagaimana pendapat informan TR, GP, JK dan MH. Sedangkan alasan pemilihan profesi pengusaha karena dimata mereka pengusaha itu banyak uangnya. Alasan preferensi ini sesuai dengan penilaian dari informan SS¹¹. Adapun pemilihan profesi lainnya yang cukup besar jumlahnya, diantaranya adalah profesi dari partai politik, karena di Kota Semarang yang merupakan kota besar dan ibukota Provinsi Jawa Tengah tersebut juga merupakan salah satu

¹¹ Wawancara dengan Pak SS dilakukan pada tanggal 16 Mei 2015, jam 16 di Gajah Mungkur Kota Semarang.

daerah atau kandang banteng (simbol atau icon dari Pantai Demokrasi Indonesia Perjuangan - PDIP) yang cukup besar dan kuat. Dalam peta politik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi yang PDIP memiliki massa yang loyal, besar dan kuat. Sedangkan dalam *scope* peta politik Indonesia, PDIP merupakan partai besar, kuat dan pemenang pemilu. Lebih dari itu, *claim* PDIP sebagai partainya *Wong Cilik*, menjadikan partai itu mendapatkan tempat di komunitas *Wong Cilik*, sebagaimana yang terjadi di Kota Semarang, sehingga *Wong Cilik mendukung* pemimpinnya yang berasal dari atau merupakan kader PDIP. Informan DSR¹² merupakan salah satu dari beberapa informan yang berpendapat atau beralasan seperti ini.

3.1.10 Preferensi terhadap Pilkada Langsung

Berdasarkan hasil evaluasi sepanjang kurang lebih 10 tahun (2004 – 2014) pelaksanaan Pemilukada Langsung berdampak positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, namun demikian dampak negatif juga muncul pula, diantaranya adalah terjadi semakin luasnya *money politics*, menghasilkan kepala daerah yang tidak *capable*, dan menelan biaya pemilu yang besar. Kondisi ini kemudian sempat memunculkan wacana apakah pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dikembalikan sebagaimana sebelumnya, yaitu dilakukan oleh DPRD. Didalam makna demokrasi adalah *ordinary people are main capitals of democracy, as famously stated “vox populi vox dei” (people voice is God voice)*. Dengan alasan ini maka menjadi penting untuk mendengar bagaimana preferensi *Wong Cilik* terhadap wacana pemilukada langsung dan tidak langsung tersebut terjadi di Kota Semarang. Riset lapangan menghasilkan data sebagaimana tabel berikut ini.

¹² Wawancara dengan Pak DSR dilakukan pada tanggal 6 Mei 2015, jam 11 di Pasar Johar Kota Semarang

Tabel 3.16

**Preferensi Responden-Informan Terhadap Pemilukada Langsung dan
Pemilukada Tidak Langsung/Melalui DPRD**

No.	Jenis Pemilukada	Jumlah	
		Frekuensi	%
1.	Pemilukada Langsung	95	95,00
2.	Pemilukada Tidak Langsung, melalui DPRD	5	5,00
3.	Tidak menjawab	0	0
Total :		100	100

Responden sebagian besar (95%) menghendaki Pemilukada tetap diselenggarakan secara langsung. Preferensi responden ini diperkuat oleh pendapat dan keinginan dari semua informan. Dasar pertimbangan mereka adalah bahwa dengan Pemilukada Langsung maka rakyat diberi kewenangan untuk memilih pemimpinnya. Masalah kemudian pemimpin yang dipilih rakyat itu tidak mampu memimpin pemerintahan atau melakukan tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lainnya, hal tersebut justru menjadikan kondisi akan terjaga tetap aman, rakyat menyerahkan permasalahan kepada hukum, dan rakyat menyadari bahwa rakyat harus ikut bertanggung jawab atas pilihannya tersebut dengan tidak menambah permasalahan, misalnya dengan demo yang sifatnya destruktif.

3.2 Analisis Data

Dalam analisis data lapangan, agar dapat disampaikan secara sistematis maka dalam sub bab ini akan terbagi menjadi 4 bagian: *Pertama*, bagaimana pandangan politik *Wong Cilik* terhadap demokrasi. *Kedua*, bagaimana pandangan politik *Wong Cilik* terhadap negara/pemerintah. *Ketiga*, bagaimana pandangan politik *Wong Cilik* terhadap Pemilukada Langsung dan Tidak Langsaung. *Keempat*, bagaimana perilaku politik *Wong Cilik* terhadap Pemilukada.

3.2.1 Pandangan Politik *Wong Cilik* Terhadap Konsep Demokrasi dan Negara/Pemerintah

Data yang terkumpul dari lapangan menunjukkan bahwa mayoritas (85%) dari *grass root* yang diteliti tidak memahami makna demokrasi yang sesungguhnya. Mayoritas responden tidak begitu khawatir/cemas/risau apakah mereka tahu

demokrasi atau tidak. Wawancara dengan informan kunci menunjukkan bahwa meskipun responden tidak memahami arti demokrasi, mereka benar-benar menyadari keberadaan bangsa atau negara. Mereka tidak peduli apakah demokrasi atau tidak, yang penting menurut mereka adalah bahwa bangsa atau negara yang dibutuhkan oleh mereka. Menurut mereka, negara diperlukan untuk melindungi kebutuhan mereka seperti keamanan, pendidikan, ekonomi atau kebutuhan sosial lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal-hal konseptual, responden memiliki pengetahuan tidak cukup tentang demokrasi. Namun, mereka sadar tentang pentingnya negara atau pemerintah. Pemerintah, menurut mereka, adalah signifikan untuk hidup dan kebutuhan responden. Meskipun mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang demokrasi, mayoritas responden menegaskan bahwa pemerintah adalah yang pertama dan aktor utama dalam menentukan kualitas hidup mereka seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi serta infrastruktur.

Dalam pandangan mereka, demokrasi atau tidak adalah bukan masalah besar mereka. Kehadiran negara atau pemerintah adalah signifikan menurut mereka. Mereka membutuhkan pelayanan pemerintah berkaitan dengan administrasi dasar seperti kartu identitas warga negara, kartu asuransi kesehatan, akte kelahiran, kartu pendidikan dan sebagainya. Kartu ini diperlukan untuk meminta layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah.

3.2.2 Pandangan Poltik *Wong Cilik* Terhadap Pemilukada Langsung dan Tidak Langsung

Meskipun responden tidak memahami konsep demokrasi, mereka melihat bahwa pemilu adalah penting. Beberapa isu-isu publik yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, dalam pandangan politik masyarakat *grass root*, perlu ditangani dengan baik oleh calon terpilih. Isu-isu ini mengacu pada beberapa persoalan seperti bentuk pemilihan walikota, masalah-masalah umum yang harus segera diatasi pemerintah, media massa yang digunakan dalam hubungan untuk

pemilihan kepala daerah, masyarakat mempengaruhi suara dan karakteristik pemimpin politik yang mereka inginkan.

Dalam hubungan dengan pertanyaan tentang jenis pemilu lokal walikota (apakah mereka memilih pemilihan langsung atau tidak langsung, sebagian besar responden (95%) menegaskan bahwa mereka memilih jenis pemilihan langsung. Preferensi ini diperkuat oleh para informan yang menegaskan bahwa pemilihan langsung lebih baik dari pemilu tidak langsung (dipilih oleh DPRD, DPRD kota). Alasan mereka adalah bahwa hak untuk mengelola masa depan Kota mereka adalah terketak pada masyarakat, bukan pada politisi. Oleh karena itu, masyarakat adalah lembaga yang paling sah untuk menentukan masa depan Kota mereka melalui pilkada langsung. Meskipun mereka tidak optimis bahwa pilkada langsung akan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka, mereka masih percaya dan memilih pemilihan langsung sebagai pilihan pemilihan walikota. Wawancara dengan beberapa sopir taksi, pemimpin pedagang kaki lima dan tukang becak yang ditokohkan oleh kelompok/paguyubannya menegaskan bahwa "masyarakat *grass root* lebih memilih untuk pemilihan kepala daerah langsung karena mereka dapat mengekspresikan keputusan politik mereka dan memilih pemimpin favorit mereka. Pemilihan langsung juga dapat memberikan peluang besar kepada mereka untuk langsung menghubungi atau berkomunikasi dengan calon walikota ". Adapun, sejumlah kecil responden (5%) yang memilih pemilihan tidak langsung (melalui kota DPRD) berpendapat bahwa orang-orang yang benar-benar tidak siap untuk membuat keputusan politik namun karena mereka tidak benar-benar memahami apa yang terjadi pada kehidupan politik kota mereka. Mereka mengatakan "terserah pemerintah atau pemimpin, kita pengikut dan akan setia pada pemimpin"¹³

Media massa digunakan untuk memperoleh informasi publik dan dalam hubungannya dengan pemilu lokal langsung di Kota Semarang, menurut pandangan politik *grass root*, didominasi oleh televisi (78 %). Mereka

¹³ Wawancara dengan EDS pada tanggal 17 Mei 2015 di Tembalang Kota Semarang.

mengkonfirmasi bahwa televisi merupakan sumber utama berita politik. Internet, radio atau koran tidak begitu sering digunakan oleh komunitas ini. Televisi menjadi sumber utama karena mereka tidak harus membayar untuk itu secara teratur. Sedangkan internet atau koran, mereka harus membayar untuk itu, sehingga mereka tidak menggunakan media ini dibayar.

3.2.3 Perilaku “Otonom dan personal kekerabatan ” *Wong Cilik* Dalam Pemilukada

Berkaitan dengan pertanyaan tentang siapa orang atau masyarakat yang mempengaruhi suara politik mereka, mayoritas responden (masyarakat *grass root*) menegaskan bahwa diri mereka sendiri (48%) dan keluarga (29%) adalah dua aktor utama yang menentukan pilihan politik mereka. Data ini benar-benar menunjukkan bahwa ada perubahan orientasi politik, baik pada pemimpin formal maupun informal kini bukan pelaku utama dalam menentukan keputusan politik masyarakat *grass root*. Masyarakat ini percaya diri mereka dan keluarga sebagai pelaku utama dalam memutuskan opini atau keputusan politik. Ini memberikan gambaran bahwa masyarakat *grass root* lebih personal dan otonom dalam hal pilihan politik.

Responden mengatakan bahwa karakteristik pemimpin atau walikota yang mereka inginkan adalah perhatian/peduli pada masyarakat (42%) dan jujur (27%). Perhatian dan jujur adalah bagian dari modal psikologis sosial bagi seorang pemimpin untuk memimpin. Meskipun mayoritas masyarakat *grass root* adalah miskin atau hidup di bawah garis kemiskinan, mereka tidak mencari orang kaya sebagai indikator untuk menjadi pemimpin yang baik.

4.3 Perilaku politik *Wong Cilik* terhadap pemilukada

Dalam kaitan dengan perilaku politik, pandangan politik *grass root* dapat dilihat dari tanggapan mereka untuk pemilukada dalam kaitannya dengan politik uang. Pertanyaan mengenai pandangan tentang politik uang, masyarakat politik *grass root* menegaskan bahwa mereka permisif untuk politik uang. Mayoritas responden (81%) menekankan bahwa mereka siap untuk menerima uang yang diberikan oleh

calon selama proses atau waktu pemilu. Mereka melihat bahwa menerima uang selama pemilu adalah wajar karena calon akan dibayar gaji besar ketika mereka terpilih.

Mengapa masyarakat *grass root* permisif intervensi uang selama proses pemilu? Mengapa uang dianggap sebagai faktor yang signifikan dalam perilaku politik dari politik *grass root* di Kota Semarang? Ada tiga penjelasan utama yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. *Pertama*, mayoritas masyarakat politik *grass root* percaya bahwa menerima uang selama pemilu adalah dapat diterima, karena mereka miskin dan membutuhkan uang untuk mempertahankan hidup mereka, menerima uang dari semua orang tidak ada masalah. *Kedua*, mereka percaya bahwa calon akan memiliki banyak fasilitas dan uang atau gaji besar jika mereka menang pemilu sehingga siapa pun yang bersedia menjadi pemimpin harus mempersiapkan uang mereka untuk seleksi politik. *Ketiga*, pemimpin hanya akan datang atau mengunjungi ke orang-orang *grass root* selama waktu pemilihan, sehingga ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari calon.

Namun, meskipun masyarakat *grass root* yang mau menerima uang politik, pilihan politik mereka tidak selalu dipandu oleh uang yang diberikan, tetapi akan tergantung pada pertimbangan mereka sendiri. Ini berarti bahwa pemilih *grass root* yang sangat egois dan ekonomi rasional. Egoistik, dalam arti, bahwa mereka bersedia untuk menerima "politik" uang tetapi mereka otonom dalam membuat pilihan politik dan tidak ingin dibimbing oleh motif politik calon (atau tim mereka).

Informan kunci KMS¹⁴ dari grup sopir ojek menegaskan bahwa "hidup kita sulit sehingga setiap peluang untuk menghasilkan uang dilakukan, termasuk menerima uang dari aktor-aktor politik. Politik uang diterima karena mereka membutuhkannya. Jumlah berapa banyak yang diterima tidak penting. Hal yang

¹⁴ Wawancara dengan KMS pada tanggal 23 Mei 2015, Jam 19.00 di Terminal Banyumanik, Kota Semarang

penting adalah kita punya uang”. Wawancara ini dapat dilihat sebagai representasi dari masyarakat politik *grass root* dalam hal peran atau pengaruh uang terhadap pandangan politik mereka atau pemilihan. Pandangan dan tindakan politik *grass root* dapat disimpulkan sebagai egois-pragmatis-transaksional.

Mengapa perilaku egoistik-pragmatis-transaksional? Karena mereka senang menerima uang untuk alasan politik, tetapi mereka tidak ingin terikat dengan komitmen untuk memilih pada kandidat yang memberi mereka uang. Transaksional berarti bahwa mereka hanya melakukan seperti bisnis, menjual suara mereka dan berharap uang atau keuntungan dari calon.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Ada beberapa temuan penting yang dihasilkan dari penelitian ini mengenai beberapa aspek, yaitu pemahaman politik *grass root* tentang demokrasi, pemahaman politik *grass root* tentang negara dan pemerintah, pandangan politik *grass root* tentang pemilu dan perilaku politik *grass root* terhadap pemilukada. Temuan penelitian ini dihasilkan dari data survei dan *indepth interview*.

1. Masyarakat *grass root* di Kota Semarang memiliki pemahaman terhadap makna demokrasi yang sebenarnya, amat sangat minim. Namun mereka tidak peduli, tidak khawatir dan tidak cemas terhadap ketidakpahaman ini. Masyarakat *grass root* tidak peduli mau demokrasi ataupun tidak, karena menurut mereka yang lebih penting adalah bagaimana kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi.
2. Pemahaman politik *grass root* dalam hal negara dan pemerintahan di Kota Semarang adalah bahwa negara dan pemerintahan merupakan aktor penting dan utama bagi pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup masyarakat. Keberadaannya adalah signifikan untuk hidup dan kebutuhan hidup masyarakat.
3. Pandangan politik *grass root* terkait pemilukada di Kota Semarang adalah mereka lebih setuju dengan pemilukada langsung, karena mereka berhak untuk memilih pemimpin dan ikut menentukan masa depannya. Meskipun mereka pesimis bahwa pemilukada langsung akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Perilaku politik *grass root* terkait pemilukada di Kota Semarang, dapat ditetapkan sebagai perilaku *egoistic-pragmatic-transactional*, yaitu bahwa masyarakat *grass root* adalah *permissive to money politics*. Pemberian uang

masyarakat *grass root* adalah *permissive to money politics*. Pemberian uang dari calon pemimpin menjadi dorongan pemberian suara yang besar, dengan alasan mereka miskin, mereka butuh uang dan *moment* pemilukada ini menjadi ajang mereka untuk menerima dan mendapatkan tambahan uang (*pragmatic*), namun masalah memilih adalah merupakan pertimbangan yang berasal dari diri sendiri dan menjadi urusan rahasia (*egoistic/ autonomic*), walaupun ada kecenderungan yang besar bahwa suara akan dapat diberikan pada calon yang memberi uang/hadiah lebih besar (*transactional*).

5. Faktor penyebab perilaku *egoistic-pragmatic-transactional* pada masyarakat *grass root* di Kota Semarang adalah karena faktor kemiskinan, faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan makna demokrasi dan pemilu, yang disebabkan oleh keluarga (dengan kategori miskin) sebagai agen sosialisai politik yang lebih determinan berpengaruh terhadap kehidupan politik mereka, dan ketidakpercayaan atau pesimis akan masa depan kepemimpinan politik, dimana pemimpin banyak yang korup dan tidak peduli (lagi setelah terpilih) terhadap masa depan dan kualitas hidup masyarakatnya. Pemilukada tidak akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi, baik secara teoritis dan praktis yang dapat ditarik dan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan politik kepada masyarakat *grass root* di Kota Semarang adalah perlu dilakukan terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan yang kurang tentang demokrasi. Mereka percaya kepada pemerintah, tetapi mereka tidak tahu konseptual tentang demokrasi.
2. Perlu kebijakan dan respon pemerintah Kota Semarang dalam menangani pesimisme masyarakat *grass root* untuk pemilu lokal walikota. Karena masyarakat *grass root* tidak percaya bahwa pemilukada akan dapat

membuat hidup mereka lebih baik, penting untuk memberikan banyak program pemerintah untuk meningkatkan optimisme masyarakat *grass root* terhadap pemilu.

3. Perhatian dan pemberian kesempatan dan pendanaan lebih banyak studi dan penelitian tentang topik politik *grass root*.
4. Mengembangkan modal sosial di kalangan masyarakat *grass root* adalah penting untuk menghadapi perilaku politik egoistik-pragmatis-transaksional. Ini mungkin tidak mudah karena kemiskinan dan kondisi yang parah ekonomi masih serius terjadi di Kota Semarang.
5. Kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat *grass root* akan mengurangi efek negatif dari pemilukada langsung seperti politik uang atau pembelian suara. Pemerintah tidak perlu lelah dalam merespon masalah ini. Banyak upaya harus dilakukan meskipun hal ini mungkin perlu waktu lama untuk menyelesaikan

DAFTAR PUSTAKA

- Bartels, L.M. (1996). *Public Opinion and Political Interests*, Department of Politics and Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University
- Budiardjo, Meriam., Prof. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Burns. James MacGregor. (1989). *Government by the People*, textbook, 21 editions, (Prentice-Hall, 1952–present) en.wikipedia.org/wiki/
- Collins English Dictionary. (2012). *Complete & Unabridged Digital Edition* © William Collins Sons & Co. Ltd. 1979, 1986 © HarperCollins, Publishers.
- Converse, P.E. (1987). *Changing Conception of public opinion in political Process*, Public Opinion Quarterly, Vol. 51, Issue 2.
- Danziger, J.N. (2005). *Understanding the Political World: A Comparative Introduction to Political Science*, Pearson Longman, New York.
- Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. (2003). *Collecting and Interpreting Qualitative Materials*. Second Edition. London: Sage Publications.
- Garner, Bryan A. Ed. (1999). *BLACK'S LAW DICTIONARY*, West Publishing.
- Huntington, Samuel P. (1991). *"The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century"*. Norman: University of Oklahoma Press.
- .(1997). *After Twenty Years: The Future of the Third Wave*, Journal of Democracy 8 (4).
- Locke, John. (1689). *The Two Treatise of Civil Government*, London: Awnscham Churchill
- McAllister, Ian. and Juliet Clark. (2007). *Trends in Australian Political Opinion: Results from the Australian Election Study, 1987-2004*. Canberra: Australian Social Science Data Archive.
- Okun, A.M., 1962. Potential GNP: Its Measurement and Significance, Proceedings of the Business and Economic Statistics, 98-103

Owen, D. (2008). *Political Socialization in the Twenty-first Century: Recommendations for Researchers*, Georgetown University, Washington D.C.

Raaflaub, Kurt A.; Ober, Josiah; Wallace, Robert W. (2007). *Origins of Democracy in Ancient Greece*. Berkeley: University of California Press. ISBN 9780520932173.

Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005 by Random House, Inc. All rights reserved

Schwarzer. (2011). *Political Socialization as the Driving Factor for Political Engagement and Participation*, ELECDem, Amsterdam

Sodaro. Michael J. (2004). *Comparative Politics. A Global Introduction*, New York: Mc Graw Hill.

Sudarsono. (1991). *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Scotland Act. (1998). <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/contents#pt1-pb2-l1g2>

https://www.academia.edu/3654706/Wacana_Pemilihan_Gubernur_Bupati_Walikota_Oleh_DPRD_dalam_RUU_PILKADA

"Victorian Electronic Democracy : Glossary". Accessed 28 July 2005)

<http://simgakin.semarangkota.go.id/2015/website/web>

<http://semarangkota.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1>

<http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wp-content/uploads/2014/07/rkpd-2015-full-fix.pdf>

http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Buku_Ketahanan_Sosial_2009.pdf

<http://news.detik.com/jawatengah/2754365/gubernur-ganjar-umumkan-umk-2015-jawa-tengah-dalam-bahasa-jawa>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR : 254 /SK/UN7.3.7/2015

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PENYUSUNAN PENELITIAN PEMBINAAN
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2015

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung visi dan misi Universitas Diponegoro yaitu mewujudkan universitas riset pada Tahun 2020 dengan standar mutu internasional melalui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, publikasi dan HKI serta pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan perihal bantuan penyusunan penelitian pembinaan yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2015;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/O/2002 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

Memperhatikan: 1. Kepdirjen Perti Nomor 116 Tahun 1968 Tentang Pendirian Fakultas Sosial dan Politik Universitas Diponegoro;

2. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 08/SK/PT09/1983 Tentang Perubahan nama Fakultas Sosial dan Politik Universitas Diponegoro menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro;

3. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 267/SK/H7/2008 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Reguler I dan Reguler II pada Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENYUSUNAN PENELITIAN PEMBINAAN PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2015.

KEDUA : Menetapkan nama-nama peneliti yang berhak mendapatkan bantuan penyusunan penelitian pembinaan tahun 2015, seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Bantuan penyusunan penelitian pembinaan akan dibayarkan kepada peneliti setelah peneliti memenuhi kewajiban mengumpulkan laporan hasil penelitian dan artikel ilmiah.

KEEMPAT : Besaran bantuan penyusunan penelitian pembinaan yang diberikan kepada tiap-tiap peneliti dalam lampiran keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

Golongan	Paket	Jumlah Kontrak
IV	1	10.000.000
	2	9.420.000
	3	8.240.000
III	1	8.950.000
	2	8.425.000
	3	7.370.000
Staf Pengajar/Kontrak	1	8.950.000
	2	8.425.000
	3	7.370.000

- KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Fakultas, peneliti tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka peneliti akan dikenakan sanksi berupa:
- a. Jika tidak berhasil menyerahkan laporan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka peneliti wajib mengembalikan seluruh dana penelitian (100%) dan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh skema penelitian di lingkungan FISIP Undip selama satu tahun berikutnya.
 - b. Jika tidak berhasil menyerahkan luaran hasil penelitian konkret pada tahun yang bersangkutan (2015) sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan kompetisi maka peneliti wajib mengembalikan dana paket publikasi dan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh skema penelitian di lingkungan FISIP Undip selama satu tahun berikutnya.
 - c. Peneliti yang tidak menyerahkan poster (*standing banner*) dan artikel ilmiah untuk keperluan publikasi internal maksimum saat diseminasi hasil penelitian akan dikenai denda sebesar 10 persen dari total anggaran yang diterima.
- KEENAM : Pencairan Bantuan Penyusunan Penelitian Pembinaan FISIP Undip Tahun 2015 dibayarkan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap pertama sebesar 60% dari nilai perjanjian,
 - b. Tahap kedua sebesar 40% dari nilai kontrak perjanjian.
- KETUJUH : Denda penelitian akan disetorkan ke rekening penampung Rektor Universitas Diponegoro, dengan nomor rekening 136-000 66-44-592, atas nama : Pos Kredit FISIP Undip.
- KEDELAPAN : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2015 alokasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Maret 2015.

Semarang, 30 Maret 2015

a.n Rektor,
Dekan,

Dr. Sunarto, M.Si

NIP 196607271992031001

B. JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN :

NO.	NAMA PENELITI	NIP	GOL.	JUDUL	BANTUAN PENELITIAN (Rp.)
1.	Drs. Purwoko, M.S.	1953081019 8203.1.001	IV/A	Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.	Rp. 8.240.000,00
2.	Dra. Fitriyah, M.A.	1962032719 8603.2.001	IV/B	Politik Uang Dalam Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati (Studi Kasus di 2 (dua) Desa.	Rp. 8.240.000,00
3.	Nunik Retno Herawati, S.Sos., M.Si.	1971103019 9903.2.001	III/C	Kebijakan Desentralisasi Pendidikan: Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.	Rp. 7.370.000,00
4.	Drs. Ahmad Taufiq, M.Si.	1959031819 8603.1.003	IV/A	Penurunan Tingkat Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir Berbasis Pemberdayaan Civil Society di Kabupaten Banyumas.	Rp. 8.240.000,00
5.	Dra. Rina Martini, M.Si.	1967031319 9303.2.001	III/D	Persepsi Mahasiswa FISIP Undip Terhadap Profil Kabinet Kerja Jokowi.	Rp. 7.370.000,00
6.	Dr. Kushandajani	1962061419 8603.2.002	IV/A	Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Semarang.	Rp. 8.240.000,00
7.	Dra. Sulistiyowati, M.Si.	1957050919 8303.2.001	III/C	Kinerja Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2014.	Rp. 7.370.000,00
8.	Drs. Priyatro Harsasto, M.A.	1961062119 8703.1.001	IV/A	Partisipasi Publik Dalam Penyediaan Transportasi Massal Kota Surakarta.	Rp. 8.240.000,00
9.	Dra. Wiwik Widayati, M.Si.	1961011519 8603.2.001	IV/A	Memeta Kemampuan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Dalam Mengelola Potensi.	Rp. 8.240.000,00
10.	Drs. Susilo	1950001010	IV/A	Fenomena Perilaku	Rp. 8.240.000,00

				Aksara Jawa.	
12.	Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si.	1977082020 0501.1.002	III/A	Inovasi Pemerintahan Daerah: Penggunaan Jejaring Sosial Twitter Oleh Walikota Semarang Untuk Komunikasi Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Semarang.	Rp. 7.370.000,0
13.	Drs. Yuwanto, M.Si, Ph.D.	1965032519 803.1.001	IV/A	Persepsi Elit Lokal Terhadap Wacana Pemekaran Kabupaten Cilacap.	Rp. 8.240.000,0
14.	Dr. Drs. Edi Santosa, S.U.	1955021719 8103.1.1.001	IV/B	Analisis Kebijakan Lingkungan di Kota Semarang.	Rp. 8.240.000,0
15.	Drs. Turtiantoro, M.Si.	1958041819 8403.1.002	IV/A	Pergeseran Kekuatan Politik Di DPRD Propinsi Jawa Tengah.	Rp. 8.240.000,0
16.	Dra. Puji Astuti, M.Si.	1962090419 8703.2.001	IV/A	Analisis Anggaran Responsif Gender Pada APBD Kota Semarang Tahun 2012-2013.	Rp. 8.240.000,0
17.	Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.	1969101019 97031001	III/C	Dinamika Pemilu di Daerah Perbatasan Negara: Studi Kasus Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 - 2014.	Rp. 7.370.000,0
18.	Wahid Abdulrahman, S.IP., M.Si.	1985050720 1404.1.001	III/B	Evaluasi Badan Legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah 2009-2014.	Rp. 7.370.000,0
19.	Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin.	1969082219 94031003	III/C	Local Good Governance Sustainability: Roles of Civil Society in Surakarta City.	Rp. 8.950.000,0
20.	Dr. Dra. Reni Windiani, M.Si.	1965090319 8902.2.001	III/A	Persepsi Masyarakat Terhadap Teroris: Studi Kasus Masyarakat Temanggung dan Solo Jawa Tengah.	Rp. 7.370.000,0
21.	Dra. Rr. Hermeni S., M.Si.	1963042219 8903.2.001	III/C	Pemilukada Dalam Pandangan Politik Wong Cilik Kota Semarang.	Rp. 7.370.000,0

22.	Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int.	1987070120 1404.1.001	III/B	ISIS VIS A VIS ISLAM[ISME] : Pemetaan Pandangan Gerakan Radikalisme Islamisme di Indonesia Terhadap Kemunculan Islamic State in Iraq And Syria.	Rp. 7.370.000,0
23.	Ika Riswanti P., S.H., M.H., Ph.D.	1982032120 0312.2.002	III/C	Community Fisheries Legal Framework : Harmonisasi Hukum Perikanan Kelautan Dibawah Konstruksi AEC Dengan Kerangka Model Kebijakan Uni Eropa Terhadap Penanganan UU Fishing.	Rp. 7.370.000,0
24.	Marten Hanura, S.IP., M.P.S.	Kontrak	-	Menakar Hubungan Politik Luar Negeri Indonesia-Rusia Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.	Rp. 7.370.000,0
25.	Mohammad Rosyidin, S.Sos., M.A.	Kontrak	-	Menjadi warga internasional yang baik? bantuan kemanusiaan indonesia kepada ukraina dalam konflik rusia-ukraina 2014-2015.	Rp. 7.370.000,0
26.	Nadia Farabi, S.Hub.Int., M.A.	Kontrak	-	Kajian Humaniter Rumah Tahan Gempa Bantuan Internasional Non-Governmental Organizations (INGO).	Rp. 7.370.000,0

C. JURUSAN ILMU KOMUNIKASI :

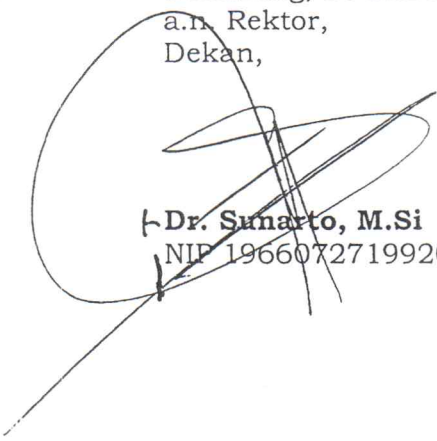
NO.	NAMA PENELITI	NIP	GOL.	JUDUL PENELITIAN	BANTUAN PENELITIAN (Rp.)
1.	Dra. Hj. Sri Budi Lesari, S.U.	1955052219 8003.2.009	IV/A	Memahami Interaksi Komunikasi Orangtua-Remaja pada Keluarga Kelas Menengah Terkait Pemanfaatan Fasilitas Media	Rp. 9.420.000

E. TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF)

NO.	NAMA PENELITI	NIP	GOL.	JUDUL	BANTUAN PENELITIAN (Rp.)
1.	Bulan Prabawani, S.Sos., M.M., Ph.D.	1976111520 0312.2.001	III/B	Proses Pembimbingan Skripsi Program Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro	Rp. 10.000.000

Semarang, 30 Maret 2015

a.n. Rektor,
Dekan,


Dr. Sunarto, M.Si

NIP 196607271992031001,

